

**PEREMPUAN DI PARLEMEN LOKAL:
Pengalaman dari Nusa Tenggara Timur**

AUDRA JOVANI

Perempuan di Parlemen Lokal: Pengalaman dari Nusa Tenggara Timur / Audra Jovani – Jakarta: UKI Press, 2024.

viii + 92 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-623-8287-37-6

Editor: Mathilda AMW Birowo
Perancang Grafis: Matthew J. Katuuk

Penerbit: UKI Press - Anggota APPTI, IKAPI
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta – 13630
Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku dengan judul “Perempuan di Parlemen Lokal: Pengalaman dari Nusa Tenggara Timur” ini bertujuan untuk menjelaskan keberhasilan dan kemenangan perempuan calon legislatif (caleg) dalam pemilu 2019 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ditengah kuatnya budaya patriarki, peningkatan representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT ini menjadi kabar baik karena secara kuantitas jumlahnya meningkat dari sembilan orang menjadi 12 orang. Di mana, secara nasional pada pemilu 2019 hanya terdapat enam provinsi dengan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen (DPRD provinsi) lebih dari 100 persen yaitu Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua Barat.

Buku ini menjelaskan pengalaman empat perempuan caleg di NTT dalam memanfaatkan modal sosial dan *moral capital* yang dimilikinya untuk mencapai kemenangannya dan akhirnya terpilih menjadi anggota legislatif pada pemilu 2019 di DPRD Provinsi NTT Periode 2019-2024. Keempat perempuan caleg ini berasal dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB dan Partai Golkar.

Buku ini diharapkan memberi masukan strategis bagi perempuan, khususnya perempuan caleg dalam memanfaatkan modal sosial dan *moral capital* untuk mencapai kemenangannya menjadi wakil rakyat.

Ucapan terima kasih kepada empat perempuan caleg terpilih di DPRD Provinsi NTT Tahun 2019-2024, pimpinan partai politik di NTT (Partai Nasdem, PDI Perjuangan, PKB dan Golkar), tim yang terlibat dalam

pengumpulan data (Budi Chrismanto Sirait, Yulius Tamonob). Ucapan terima kasih juga kepada Universitas Kristen Indonesia sebagai penyedia dana.

Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, 24 Januari 2024

Audra Jovani

DAFTAR ISI

Kata Pengantar – iii

Daftar Isi – v

Daftar Grafik & Tabel – vii

Daftar Bagan – viii

Bab 1 Pendahuluan – 1

1.1 Pentingnya Kehadiran Perempuan di Parlemen – 1

1.2 Representasi Politik Perempuan – 4

Bab 2 Perempuan dalam Pemilu DPRD Provinsi NTT – 7

2.1 Pandangan Sosial, Budaya dan Politik terhadap perempuan NTT – 7

2.2 Dukungan Elit Partai terhadap Perempuan Caleg – 9

2.3 Tantangan Perempuan NTT dalam Politik – 29

Bab 3 Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2019 di DPRD Provinsi NTT – 35

3.1 Perempuan di DPRD Provinsi NTT Era Reformasi – 35

3.2 Perempuan Caleg Terpilih pada Pemilu 2019 di DPRD Provinsi NTT – 42

3.3 Pengalaman Empat Perempuan Caleg Terpilih – 48

**Bab 4 Strategi Kemenangan Perempuan Caleg di
DPRD Provinsi NTT dalam Pemilu 2019 – 69**

4.1 Pemanfaatan Modal Sosial dan *Moral Capital* –
69

4.2 Kemenangan Perempuan Caleg – 77

Daftar Pustaka – 81

Indeks – 91

Tentang Penulis – 91

DAFTAR GRAFIK & TABEL

Grafik 1.1	Jumlah Representasi Perempuan di DPR RI 3
Grafik 1.2	Jumlah Representasi Perempuan di DPR Provinsi dan DPRD Kab/Kota 4
Tabel 2.1	Pendapat Elit Partai Politik terhadap Empat Perempuan Caleg pada Pemilu 2019 25
Tabel 3.1	Anggota DPRD Provinsi NTT Pemilu 2014 menurut Jenis Kelamin 35
Tabel 3.2	Jumlah Anggota DPRD Provinsi NTT dari Masa ke Masa menurut Jenis Kelamin 37
Tabel 3.3	Jumlah Perempuan Caleg DPRD Provinsi NTT Pemilu 2014 39
Tabel 3.4	Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Provinsi NTT Pemilu 2014 40
Tabel 3.5	Perolehan Suara Calon Terpilih Perempuan Anggota DPRD Provinsi NTT Pemilu 2014 41
Tabel 3.6	Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Provinsi NTT Pemilu 2019 42
Tabel 3.7	Perempuan Anggota DPRD NTT Periode 2019-2024 43
Tabel 3.8	Latar Belakang Perempuan Caleg Terpilih Pada Pemilu 2019 45
Tabel 3.9	Profil Empat Perempuan Caleg Terpilih DPRD Provinsi NTT 2019-2024 48
Tabel 4.1	Pemanfaatan Modal Sosial dan <i>Moral Capital</i> Empat Perempuan Caleg pada Pemilu 2019 di DPRD Provinsi NTT 71

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1	Pengalaman Empat Perempuan Caleg dalam Pemilu 2019 di DPRD Provinsi NTT 77
-----------	---	----------

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Pentingnya Kehadiran Perempuan di Parlemen

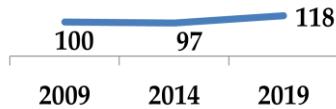
Bicara mengenai perempuan dan demokrasi, yang sering kali menjadi pertanyaan adalah “Mengapa perempuan harus masuk dalam politik atau mengapa representasi politik perempuan sangat penting di negara kita?” Untuk menjawab pertanyaan ini, ada tiga poin penting, yaitu: *Pertama*, tentu saja berhubungan dengan Amanat Konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat 1 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat 3 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. *Kedua*, dalam Pancasila sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan”, di mana partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang adil adalah keharusan atau wajib. *Ketiga*, adanya jaminan hukum partisipasi politik secara global. Hal mana tercantum dalam konvensi PBB terkait dengan Hak-Hak Politik Perempuan yakni Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/CEDAW*).

Keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat penting terutama dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Nur Iman Subono mengenai alasan mengapa perempuan perlu terwakili secara politik, yaitu: 1). keadilan (*justice*) dan kesetaraan (*equality*); 2). kepentingan perempuan (*women*

interest); 3). emansipasi (*emancipation*) dan perubahan (*change*) dalam proses politik (*political process*); 4). argumen *difference*; dan 5). argumen *role model*. Keberadaan perempuan dalam lembaga representatif akan mendorong perempuan lain untuk ikut terlibat dalam politik (Subono, 2009)

Keterwakilan perempuan dalam parlemen juga diungkapkan oleh Joni Lovenduski dan Azza Karam bahwa, secara normatif kehadiran perempuan diharapkan dapat memengaruhi kinerja lembaga legislatif dalam menghasilkan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan perempuan melalui empat cara sebagai berikut : 1). menyangkut bidang institusional atau prosedural, yaitu membuat parlemen lebih ramah kepada perempuan melalui langkah-langkah yang dapat menunjukkan kepedulian gender yang lebih besar; 2). berkenaan dengan representasi, artinya menjamin keberlanjutan dan peningkatan akses perempuan ke parlemen, dengan mendorong kandidat-kandidat perempuan, mengubah undang-undang pemilihan dan kampanye, serta memajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin; 3). memberi dampak atau pengaruh terhadap keluaran (*output*). Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan upaya melakukan “feminisasi” legislasi dengan memastikan bahwa semua perundang-undangan atau semua produk kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif benar-benar mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan (*gender sensitive*); 4). diskursus yaitu mengubah bahasa parlementer sehingga perspektif perempuan menjadi suatu hal yang wajar dan mendorong perubahan sikap publik terhadap perempuan” (Lovenduski & Karam, 2002).

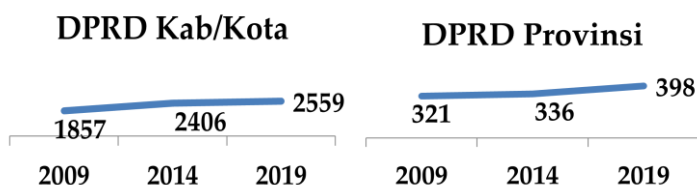
DPR RI



Grafik 1.1 Jumlah Representasi Perempuan di DPR RI

Namun demikian, realitanya representasi politik perempuan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah atau perlu ditingkatkan. Hal ini dapat ditinjau dari representasi perempuan di tingkat pusat (DPR) yang tidak signifikan atau belum memenuhi kebijakan afirmatif kuota 30 persen perempuan. Pada pemilu 2009 sebanyak 18 persen atau 100 dari total 580 kursi, dan pemilu 2014 terdapat 17 persen atau 97 dari total 580 kursi dan pemilu 2019 yang lalu sebanyak 20 persen atau 118 dari total 580 kursi.

Demikian halnya dengan representasi perempuan di tingkat lokal (DPRD provinsi). Berdasarkan data berikut, tampak bahwa representasi perempuan masih rendah, pada pemilu 2009 terdapat 16 persen atau 321 dari total 2.005 kursi, pemilu 2014 terdapat 16 persen atau 336 dari total 1.776 kursi, dan pemilu 2019 yang lalu terdapat 18 persen atau 398 dari total 2.207 kursi. Sedangkan di DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu 2009 terdapat 12 persen atau 1.857 dari total 13.901 kursi, pemilu 2014 terdapat 14 persen atau 2.406 dari total 12.360 kursi dan 15 persen atau 2.559 dari total 16.770 kursi pada pemilu 2019 yang lalu.



Grafik 1.2 Jumlah Representasi Perempuan di DPR Provinsi dan DPRD Kab/Kota

Secara kuantitas jumlah tersebut masih terbilang jauh dari kuota 30 persen representasi perempuan. Hal ini tentu saja berdampak pada kebijakan yang dihasilkan sebagai pembuat kebijakan. Berangkat dari realita tersebut, telah banyak kajian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan rendahnya representasi politik perempuan dalam parlemen di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal sekaligus bagaimana solusi terbaik terhadap permasalahan ini.

1.2 Representasi Politik Perempuan

Bicara mengenai representasi politik perempuan dalam pemilu, setidaknya terdapat dua hal penting yaitu: *Pertama*, partisipasi perempuan sebagai pemilih; *Kedua*, partisipasi perempuan sebagai calon legislatif (caleg) di parlemen. Pentingnya perempuan di parlemen, setidaknya terdapat tiga argumen yaitu: *Pertama*, dapat dikatakan bahwa tidak ada demokrasi sejati (*no true democracy*) dan tidak ada partisipasi masyarakat yang sesungguhnya (*no true people's participation*) dalam pemerintahan dan pembangunan, tanpa adanya partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian untuk mewujudkan politik

yang demokratis, maka representasi perempuan menjadi sebuah keharusan. *Kedua*, tujuan pembangunan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya partisipasi perempuan, bukan hanya dalam pembangunan tetapi juga dalam menentukan tujuan dari pembangunan itu sendiri. *Ketiga*, partisipasi perempuan di badan-badan pembuat keputusan akan membawa prioritas dan perspektif baru yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama perempuan dan anak. Hasil signifikan yang diharapkan dari representasi perempuan adalah terwujudnya kesetaraan gender melalui parlemen (Subono, 2013).

Namun demikian, secara kuantitas representasi politik perempuan di Indonesia masih dibawah kuota 30 persen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa kajian dan riset yang dilakukan oleh penulis ditemukan setidaknya ada tiga hal penyebab rendahnya representasi ini yaitu:

Pertama, terkait dengan regulasi afirmasi. Nah, disini sistem pemilu yang proporsional terbuka ini ada kalanya tidak terlalu ramah dengan perempuan. Di lain pihak dapat dipahami bahwa pengalaman politik perempuan masih kurang jika dibandingkan dengan pengalaman laki-laki. Partai politik cenderung menempatkan atau memprioritaskan laki-laki sebagai calon anggota legislatif. Mereka juga masih kurang dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan. Meski demikian, kasus di setiap daerah berbeda, tergantung pada elit partai politik.

Kedua, ketimpangan relasi kuasa (budaya patriarki). Ini efek dari ranah privat yang berdampak pada ranah publik, di mana pengambilan keputusan perempuan dipengaruhi oleh peran atau relasi kuasa suami atau ayah. Adanya hubungan kekerabatan dalam rekrutmen politik, di mana perempuan yang terpilih adalah anak/istri/saudara dari pejabat sebelumnya. Walaupun kasus ini banyak terjadi di Indonesia,

namun berdasarkan riset yang dilakukan penulis sepanjang tahun 2018-2022 ditemukan bahwa budaya patriarki ini dimanfaatkan oleh perempuan caleg untuk mendapatkan suara melalui nama besar suami dan ayah. Kemudian, masih berkaitan dengan relasi kuasa tadi, diskriminasi terhadap perempuan ini juga berdampak pada proses kebijakan di tingkat pusat (DPR) dalam meloloskan RUU. Misalnya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang setelah melalui proses panjang pada Februari 2022 RUU ini disahkan menjadi UU. Ini penting karena UU TPKS merupakan kebijakan publik yang berperspektif pada korban dan melindungi korban kekerasan seksual (Jovani, 2022). Demikian juga kebijakan yang dihasilkan di tingkat lokal, di mana sudah terdapat perda-perda responsif gender seperti Perda Kesehatan Ibu dan Anak, Perda Tenaga Kerja Indonesia dan Perda Lingkungan Hidup (Jovani, Subono, & Suyanto, 2020).

Ketiga, tata kelola institusi politik yang bias gender. Ini dilematis, perempuan belum menjadi aktor transformatif di partai yang berdampak bagi kesetaraan dan keadilan gender. Ada kecenderungan partai politik hanya fokus pada kepentingan partai tanpa mempertimbangkan pentingnya kesetaraan. Kembali lagi, perempuan belum menduduki posisi strategis di partai, sehingga agenda kebijakan responsif/sensitif gender sulit direalisasikan. Selain itu, belum kuatnya perspektif gender bagi seluruh kader (Jovani, 2018).

Bab 2

Perempuan dalam Pemilu DPRD Provinsi NTT

2.1 Pandangan Sosial, Budaya dan Politik terhadap Perempuan NTT

Perempuan dalam pandangan masyarakat NTT adalah pribadi yang sejak kecil sudah dipersiapkan untuk menjadi calon istri. Kriteria tersebut diwujudkan dengan kesanggupan untuk mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak. Selain itu, perempuan selalu dikaitkan dengan kehidupan domestik rumah tangga. Meskipun bercorak patriarki, masyarakat NTT sangat menghormati perempuan, perempuan merupakan lambang kesuburan sebab dari perempuan individu baru manusia muncul ke dunia.

Dalam konstruksi budaya masyarakat NTT, perempuan selalu ditempatkan sebagai “orang luar” dari komunitas suku, artinya setelah perempuan menikah, ia akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk menetap dan menjadi bagian dari klan suami. Penghargaan perempuan sebagai “orang luar” ini dalam budaya masyarakat NTT disimbolkan melalui budaya *belis*¹ khususnya pada saat upacara adat. *Belis* menjadi tanda bahwa perempuan tidak begitu saja masuk ke dalam suku suaminya. Pihak laki-laki

¹ Belis atau mas kawin atau mahar adalah sejumlah uang, hewan dan barang (gading, kain adat, peralatan dari emas dan lain-lain) yang diberikan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan sebagai syarat pengesahan perkawinan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Dinas P dan K NTT, 2003, p. 57.

harus menyerahkan sejumlah uang, barang dan hewan untuk meresmikan masuknya perempuan ke dalam suku mereka.

Bagi masyarakat NTT, perkawinan bertujuan meneruskan keturunan dan masyarakat menyadari bahwa hanya perempuan yang dapat meneruskan keturunan tersebut. Atas dasar ini, maka posisi perempuan dalam masyarakat NTT sangat dihormati. Perempuan dalam masyarakat NTT juga merupakan tulang punggung bagi kelangsungan dan pengokohan hidup rumah tangga. Dalam budaya NTT, sistem kekerabatan selalu dilandaskan pada sistem perkawinan yang sifatnya eksogami di mana laki-laki mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya, oleh karena itu pengantin perempuan disebut sebagai pendatang baru dan menjadi bagian dari suku atau klan pengantin laki-laki.

Dengan demikian, kehadiran perempuan sebagai anggota baru dalam keluarga dan suku suami membuat pola kekerabatan semakin luas. Perempuan dapat menyesuaikan diri dengan kekerabatan yang baru, perempuan menjadi patokan utama dalam membangun kekerabatan atau klan dalam masyarakat sekalipun latar belakang budaya bersifat patriarkal.

Terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat NTT terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. NTT yang menganut sistem garis keturunan ayah, dalam kegiatan sosial politik dan budaya laki-laki mendapatkan posisi yang lebih baik ketimbang perempuan. Namun dengan meningkatnya jenjang pendidikan dan kesadaran politik, masyarakat dan partai politik berangsur memiliki kepercayaan kepada caleg perempuan.

2.2 Dukungan Elit Partai Politik terhadap Perempuan Caleg

PDI Perjuangan

Visi PDI Perjuangan adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai. Hal ini berdasarkan pada pasal 6 Anggaran Dasar PDI Perjuangan: *Pertama*, terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. *Kedua*, terwujudnya masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokrasi, adil dan makmur.

Sedangkan misi PDI Perjuangan adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, dan 9 Anggaran Dasar Partai, yaitu: *Pertama*, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai. *Kedua*, memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara. *Ketiga*, menghimpun, membangun dan mengerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila. *Keempat*, menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. *Kelima*, memperjuangkan kepentingan rakyat dibidang ekonomi, sosisl dan budaya secara demokratis. *Keenam*, berjuang mendapatkan kekuatan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. *Ketujuh*, membentuk dan membangun karakter bangsa. *Kedelapan*, mendidik dan mencerdaskan rakyat agar

bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. *Kesembilan*, melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara. *Kesepuluh*, mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kesebelas*, mempertahankan dan menyebarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. *Keduabelas*, mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. *Ketigabelas*, mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara, agar terwujud pemerintah yang bersih dan berwibawa (AD dan ART PDI Perjuangan 2010-2015).

Proses rekrutmen di PDI Perjuangan dilakukan berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2011, pasal 29 ayat 1, di mana PDI Perjuangan melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik. Warga yang masuk menjadi anggota partai politik, mengikuti pendidikan politik yang berfungsi untuk menanamkan dan menyebarkan ajaran Bung Karno, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban anggota partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kaderisasi di PDI Perjuangan memiliki tiga jenjang yaitu: kaderisasi tingkat pratama, tingkat madya dan tingkat utama. Selanjutnya PDI Perjuangan memiliki sekolah partai yang bertujuan untuk membentuk kader partai yang memiliki kesadaran, ideologi, organisasi, politik dan kesadaran lingkungan, serta pemahaman terhadap aspek-

aspek sosial ekonomi kemasyarakatan; mendidik, mencerdaskan dan menyiapkan calon pemimpin partai, bangsa dan negara; serta menanamkan ajaran-ajaran Bung Karno.

Dalam merekrut caleg perempuan, PDI Perjuangan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, hal ini seperti yang disampaikan oleh Emanuel Kolfidus Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT.

“Ketika mulai ada ketentuan kuota perempuan 30 persen, partai giat melakukan kaderisasi dan rekrutmen, termasuk menyelenggarakan kursus kader khusus perempuan saat itu untuk menjawab *affirmative action* tentang kuota bahkan sampai tingkat nasional kursusnya, saat itu terjaring cukup banyak dan ditempatkan untuk pencalegan. Dua orang perempuan yang lolos pada tahun 2014 (Kristofora Bantang dan Aulora Modok), saya tahu mereka berkecimpung di partai mulai dari bawah, saya pikir karena kesadaran sendiri. Kebetulan di 2002 saya di sekretaris badan diklat PDIP NTT melaksanakan satu kursus kader namanya kursus kader madya (KKP Madya), disitu Kristofora Bantang sebagai peserta. Kemudian setelah mengikuti KKP Madya, mereka membentuk satu lembaga praktis perempuan namanya “Gema Perjuangan Sarinah” biasanya disingkat GPS.”²

Dalam penentuan penempatan caleg, pimpinan partai mengikuti regulasi (UU Pemilu), keputusan partai, petunjuk juknis, persyaratan di KPU dan ini semua dibahas dalam rapat partai. Semua bakal caleg wajib mengisi formulir pembobotan, di mana partai menyelenggarakan psikotest online dan semua bakal caleg wajib mengisi soal, psikotest

²Wawancara dengan Emanuel Kolfidus, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, Kupang.

dan formulir pembobotan, misalnya lama keanggotaan, jabatan dalam partai, *trade record* sebagai anggota legislatif dan kepala daerah. Seluruh persyaratan ini berlaku bagi semua bakal caleg baik perempuan maupun laki-laki.

Dalam perjalanannya, perempuan menghadapi hambatan, salah satu kendala perempuan masuk politik adalah faktor budaya, budaya laki-laki. Di beberapa kabupaten di NTT masih ada resistensi terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemimpin partai dan tidak sedikit oleh masyarakat di dapil.

“Semua orang mengatakan bahwa salah satu hambatan perempuan masuk politik adalah faktor budaya, budaya laki-laki. Saya melihat ada beberapa kasus masih ada, tapi semakin ke sini saya rasa keseimbangan makin ada (keseimbangan gender) dan terbuka. Di PDIP tidak ada tekanan, terbuka ruang untuk mereka yang mau terlibat atau masuk. Untuk itu dibuatlah kursus-kursus untuk menjaring perempuan, bahwa dilibatkan dalam panitia selalu ada kuota untuk teman-teman perempuan. Soal kemudian bagaimana berproses di dalam itu memang proses panjang tidak mudah, bahkan di dua wilayah yang matrilinear itu juga saya melihat belum terlalu maksimal. Karena akses perempuan itu di ranah kultural saja di adat istiadat, kalau ke politik saya lihat masih belum terlalu seluas yang di adat.”

Di beberapa kabupaten di NTT, ada sebagian perempuan yang masih terbelenggu oleh adat istiadat sehingga perempuan tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan partai politik ataupun komunitas sosial lainnya.

Namun, dengan meningkatnya jenjang pendidikan, perempuan sudah mulai diterima di dalam partai politik dengan menduduki posisi strategis, bahkan di tahun 2019

pertama kali perempuan menjadi ketua umum DPP PDI Perjuangan di NTT.

Partai Nasdem

Partai Nasdem merupakan partai politik yang berasaskan Pancasila yang didirikan pada tanggal 1 Februari 2011 di Jakarta dan dideklarasikan secara resmi pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Melalui rapat koordinasi nasional, Partai Nasdem berdiri menjadi partai baru di Indonesia. Pendirian partai ini diawali dengan pemberian mandat kepada Rio Cappelata seorang politisi untuk membangun partai politik. Pada tanggal 1 Februari 2010, Cappelata merupakan salah satu dari 45 deklarator tokoh nasional yang mendeklarasikan organisasi masyarakat (ormas) Nasional Demokrat yang dicetuskan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pendirian ormas ini akibat dari kegelisahan terhadap keadaan bangsa yang dirasa semakin merosot (Partai Nasdem, 2015).

Dalam hal keterwakilan perempuan, kebijakan Partai Nasdem adalah sebagai berikut: Dewan Pimpinan Pusat harus menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan pimpinan wilayah dan dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang dan ranting partai Nasdem diwajibkan memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pemilu legislatif tahun 2014 dan 2019, Kristien Samiyati merupakan caleg yang berasal dari Partai Nasdem juga melalui proses pencalonan sesuai aturan. Partai Nasdem pada pemilu legislatif Provinsi NTT membuka pendaftaran bagi anggota yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg. Kasimirus Kolo Wakil Ketua Bidang Organisasi,

Keanggotaan dan Kaderisasi DPW Partai Nasdem Provinsi NTT menjelaskan upaya Partai Nasdem dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu.

“Partai Nasdem ini partai yang terbuka artinya ketika berhadapan dengan *event* politik lima tahunan, partai Nasdem terbuka bagi setiap warga negara yang mempunyai kapasitas, integritas dan elektabilitas. Partai memberikan ruang untuk semua warga negara untuk terlibat dalam pikada, pileg dan seterusnya, termasuk didalamnya perempuan, partai memberikan ruang karena UU sudah mengatur kuota 30 persen perempuan ada di parlemen. Dan bagi Nasdem syarat itu memang wajar, pantas.”³

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa untuk menarik minat atau menarik partisipasi politik perempuan dalam pemilu, Partai Nasdem melakukan sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam UU. Dalam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk partisipasi politiknya, Partai Nasdem memberikan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk berkompetisi pada pemilihan umum legislatif. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa partai memberi peluang kepada anggotanya untuk mencalonkan diri sebagai caleg dalam kompetisi politik, tetapi harus menjadi pengurus terlebih dahulu.

Untuk pemenuhan kuota 30 persen perempuan pada pemilu legislatif, Partai Nasdem juga telah mempersiapkan cara agar aturan tentang jumlah rekrutmen perempuan dapat terpenuhi. Lebih lanjut Kolo menjelaskan bagaimana

³ Wawancara dengan Kasimirus Kolo, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPW Partai Nasdem Provinsi NTT, Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, di Kantor DPRD Provinsi NTT, Kupang.

Partai Nasdem memenuhi kuota 30 persen perempuan pada pemilu tahun 2014 dan 2019.

“Selama ini Partai Nasdem berupaya melalui struktur partai, mulai dari DPP, DPW, DPD seluruh kabupaten kecamatan sampai ke tingkat desa kelurahan. Agar supaya melalui struktur partai semua tingkatan itu bisa memberikan peluang bagi perempuan untuk bisa berpartisipasi. Partai Nasdem sudah melakukan upaya tersebut dan sudah dua kali pemilu memang perempuan mencapai kuota itu. Kita merekrut perempuan kemudian mereka sebagai caleg masing-masing mulai sosialisasi, konsolidasi untuk mendapatkan simpatisan dari masyarakat. Pendekatan yang digunakan untuk menarik perempuan. Ya tadi saya bilang pake pendekatan struktural. Partai, DPW di tingkat provinsi memberikan ruang terbuka, *pertama*, kita umumkan kepada masyarakat, bagi perempuan yang punya kemauan untuk terlibat di dalam politik lewat partai kita berikan informasi kepada mereka. *Kedua*, dalam struktur partai, kepada semua pengurus partai kita sampaikan untuk memberikan ruang kepada perempuan, bahkan kita juga mencari perempuan dalam situasi tertentu. Setiap orang yang mengenal perempuan sebagai sosok yang punya kepribadian kita rekrut. Tahun 2014 dan 2019 Kristien Samiyati Pati diusulkan dari DPD Kabupaten Sumba Barat, jadi itu yang saya bilang struktur partai. Mereka masuk melalui tingkatan masing-masing baru diusulkan ke provinsi. Di sini provinsi mulai melakukan proses seleksi syarat-syaratnya sebagai bakal calon.”⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan pada saat pemilu legislatif tahun

⁴Wawancara dengan Kasimirus Kolo, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPW Partai Nasdem Provinsi NTT, Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, di Kantor DPRD Provinsi NTT, Kupang.

2014 dan 2019, Partai Nasdem melakukan perekrutan untuk perempuan sama peluangnya dengan perekrutan laki-laki. Prosedur perekrutan yang dilakukan tidak ada bedanya dengan perekrutan calon anggota laki-laki. Sebagaimana dijelaskan, Partai Nasdem yang merupakan partai baru yang mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2014, belum memiliki kader. Meskipun Partai Nasdem belum memiliki kader tetap, pada pemilu legislatif Provinsi NTT lalu, Partai Nasdem ternyata mampu merekrut caleg perempuan salah satunya Kristien Samiyati.

Petinggi Partai Nasdem melihat bahwa cara pandang masyarakat terhadap perempuan baik caleg maupun anggota legislatif sudah mulai membaik seiring dengan kemajuan tingkat pendidikan serta tumbuh dan berkembangnya ekonomi. Masyarakat tidak lagi melihat perempuan sebagai orang kerja hanya di wilayah domestik saja melainkan sudah bisa masuk pada wilayah publik dalam hal ini sebagai anggota partai politik dan menjadi wakil rakyat. Seiring dengan perkembangan tersebut, pimpinan Partai Nasdem memiliki harapan besar perempuan-perempuan yang mempunyai potensi dapat aktif terlibat dan bergabung dengan partai politik.

Menurut Kasimirus Kolo, Partai Nasdem merupakan partai yang responsif gender artinya partai memerlukan perempuan sebagai partner yang setara dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selain itu, dengan kehadiran perempuan di partai politik dan di dunia politik dapat memberikan warna lain serta pendekatan yang *soft* di dalam internal partai maupun masyarakat.

Perempuan di Partai Nasdem dianggap layak sebab perempuan memiliki kemampuan individual yang baik sehingga terpilih. Masyarakat memilih perempuan karena mereka mempunyai referensi dengan latar belakang kekeluargaan, suku, agama seperti yang dilakukan oleh

pemilih tradisional. Sedangkan untuk pemilih rasional, mereka lebih memilih perempuan karena pertimbangan dan penilaian terhadap *trade record*, kapasitas, pendidikan, suku serta kemampuan komunikasi. Hal ini tampak ketika mereka terpilih pada tahun 2014 dan terpilih kembali di tahun 2019 bahkan berhasil menjabat sebagai pengurus di DPR provinsi. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah perempuan-perempuan yang layak.

Di sisi lain, partai menyadari bahwa syarat pemilu harus memenuhi kuota 30 persen. Saat ini memang partai politik masih didominasi oleh kaum laki-laki karena faktor sosial kultural yang tak dapat dihindari. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman *gender mainstreaming* tentang pentingnya memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki secara seimbang.

PKB

Visi dari PKB adalah: *Pertama*, mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual. *Ketiga*, mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Sedangkan misi dari PKB sebagai berikut, *Pertama*, bidang ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis. *Kedua*, bidang hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial. *Ketiga*, bidang sosial budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik

demikian meningkatkan harkat dan martabat bangsa. *Keempat*, bidang pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan. *Kelima*, bidang pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

PKB merupakan partai yang terbuka dalam merekrut perempuan, hal ini disampaikan oleh Yucundianus Lepa Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi NTT.

“Jadi pada prinsipnya bahwa kita dorong supaya kaum perempuan di NTT khususnya lebih berperan aktif. Artinya bahwa kalau ingin supaya kaum perempuan, ibu dan anak itu diperhatikan dan diperjuangkan, ya saya kira yang lebih pas dan mengenal mereka adalah perempuan itu sendiri. Karena mereka sejak mulai dari awal sudah merasa bagaimana bayi itu dalam kandungan, setelah dilahirkan, bertumbuh besar, hampir semua kehidupan di dalam rumah tangga itu dikerjakan oleh kaum perempuan (ibu dalam hal ini), sehingga dengan demikian maka kita di PKB dengan kebijakan nasional itu berharap supaya memang peran aktif kaum perempuan di dalam satu organisasi Sayap Perempuan Bangsa.”⁵

⁵Wawancara dengan Yucundianus Lepa, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi NTT, Selasa, tanggal 30 Juli 2019, di Restoran Hotel Pardede, Jakarta.

Tantangan yang dihadapi oleh PKB pada pemilu tahun 2014 di mana caleg perempuan tidak mengalami peningkatan, menurutnya disebabkan oleh faktor perempuan itu sendiri. Perempuan melihat partai politik sebagai urusan kaum bapak-bapak atau laki-laki. Pemikiran seperti itu bukan tanpa sebab, karena sebagian perempuan NTT masih terbelenggu oleh budaya. Walaupun demikian, di NTT terdapat dua kabupaten dengan garis keturunan ibu (matrilineal) yaitu Kabupaten Ngada dan Kabupaten Malaka, di mana pada pemilu 2014 ada dua perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Malaka.

Caleg perempuan dari PKB yang lolos menjadi anggota DPR Provinsi NTT pada periode 2014-2019 adalah Aleta Baun yang merupakan aktivis pejuang perempuan dan lingkungan. Aleta Baun mempunyai peran yang sangat kuat bagi masyarakat TTS di Pulau Timor sehingga pada saat pemilu masyarakat percaya sebab Aleta Baun sudah terbukti memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam perjalanannya masuk ke partai politik juga berdasarkan dorongan dari petinggi PKB karena melihat daya juang dari Aleta Baun di TTS.

Selanjutnya di tahun 2019, terdapat dua perempuan yang terpilih yaitu Angela M. Piwung dan Ana Waha Kolin yang merupakan pengurus partai dan caleg petahana. Keterpilihan dua perempuan ini merupakan kabar baik bagi PKB karena semakin banyak perempuan caleg yang terpilih sebagai wakil rakyat.

Partai Golkar

Untuk menghadapi peluang dan tantangan tersebut Partai Golkar bidang pemberdayaan Perempuan melalui organisasi sayap Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) telah melakukan sejumlah program kerja. Diantaranya

adalah Pembentukan Koperasi Karya Wanita pada 23 Mei 2011; pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Karya Perempuan; Melaksanakan program desa — Dasa karya, (deklarasi uji coba gerakan nasional Desa Dasa Karya pada 14 Maret 2012 di Serang, Banten. Pelantikan badan dan lembaga serta deklarasi Desa Dasa karya di Provinsi Sulsel); pelaksanaan *One Gate Policy* (Kebijakan-*One Gate Policy*) yaitu kebijakan untuk melaksanakan fungsi penjangkangan (rekrutmen) dan pembinaan bagi calon legislatif perempuan di semua tingkatan melalui satu pintu, yakni bidang pemberdayaan perempuan-KPPG di setiap tingkatan), pelantikan dan pengukuhan pengurus Daerah KPPG Provinsi, rapat, pendidikan dan pelatihan (antara lain rapat konsolidasi nasional dan diklat kader fungsional bidang pemberdayaan perempuan); orientasi fungsionaris pusat khusus perempuan; diskusi dan seminar (yaitu diskusi panel-Perempuan Partai Golkar dan UU Pemilu, serta seminar Aktualisasi Perempuan Abad 21); Kegiatan bakti sosial amaliyah Ramadhan serta buka puasa bersama anak yatim (DPP Partai Golkar, 2009).

Partai Golkar dalam rangka melakukan rekrutmen calon anggota DPR-RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota menetapkan kualifikasi kader melalui empat kriteria: *Pertama*, memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif. *Kedua*, memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar. *Ketiga*, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela. *Keempat*, memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang. Wewenang untuk melakukan proses seleksi dan penetapan calon anggota DPRD provinsi berada pada DPD Partai Golkar provinsi yang dilaksanakan oleh tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi. Tim Seleksi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi dipimpin ketua DPD Provinsi

dengan anggota-anggota: ketua harian, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang kaderisasi dan keanggotaan, wakil ketua bidang organisasi.

Dalam menetapkan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi (DCS-DCT), DPD Partai Golkar Provinsi wajib memperhatikan pertimbangan dari ketua DPD Partai Golkar kabupaten/kota, berdasarkan hasil evaluasi kinerja kader bersangkutan sebagai fungsionaris provinsi kabupaten/kota terkait. Sebelum DPD Partai Golkar provinsi menetapkan daftar calon anggota DPRD Provinsi (DCS-DCT) diharuskan berkonsultasi dengan DPP Partai Golkar untuk memperoleh persetujuan dan selanjutnya dikonsultasikan kepada ketua Umum DPP Partai Golkar guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan DPP Partai Golkar.

Sumber rekrutmen bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota adalah kader-kader Partai Golkar yang selama ini aktif dalam: kepengurusan Partai Golkar di seluruh tingkatan, anggota Fraksi Partai Golkar DPR-RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan anggota DPD RI, organisasi kemasyarakatan pendiri dan didirikan Partai Golkar, organisasi sayap Partai Golkar, pengurus badan dan lembaga yang dibentuk oleh Partai Golkar, tokoh masyarakat (tokoh agama, akademisi, budayawan dan profesional lainnya yang memiliki kompetensi dan popularitas).

Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) di Partai Golkar wajib memperhatikan hal-hal berikut ini: *Pertama*, nomor urut dalam daftar calon anggota legislatif disusun memperhatikan keterwakilan 30 persen perempuan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan. *Kedua*, nomor urut daftar calon anggota legislatif disusun memperhatikan kader muda. *Ketiga*, nomor urut dalam daftar calon anggota

legislatif, disusun memperhatikan pengurus partai yang aktif.

Dalam menghadapi pemilihan umum legislatif Provinsi NTT tahun 2014 dan 2019, setiap partai politik wajib mengirimkan calon anggota legislatif perempuannya. Partai politik pun memiliki kriteria-kriteria mengenai calon yang akan mengikuti kompetisi pada pemilu legislatif, demikian juga yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam merekrut caleg perempuan. Berikut pernyataan Inche D.P. Sayuna Sekjen DPD Partai Golkar Provinsi NTT.

“Perempuan itu juga aset politik bagi partai dan juga menjadi daya tarik khusus kepada masyarakat publik dan Partai Golkar melihat bahwa untuk bisa mendapat dukungan besar dari masyarakat ya harus memberi fokus khusus untuk perempuan dan anak muda. Kampanye Partai Golkar tahun 2019 ini memiliki *tagline* “perempuan dan anak muda”. Karena itu, dalam struktur pengurus hampir semua perempuan itu memegang posisi kunci. Jadi untuk menjadi caleg, Partai Golkar terbuka, namun harus melalui proses pengkaderan dengan mempersiapkan mental disertai dengan keterampilan sebagai seorang politisi. Selain itu terdapat organisasi sayap Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) sehingga stok caleg perempuan selalu terpenuhi.”⁶

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Inche D.P. Sayuna, bahwa dalam penentuan pencalonan kader partai untuk mengikuti kompetisi politik pada pemilu legislatif Provinsi NTT tahun 2014 dan 2019 harus melalui proses pengkaderan, disamping itu juga terdapat organisasi sayap yang menampung perempuan untuk belajar menjadi

⁶Wawancara dengan Inche D.P. Sayuna, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTT, Selasa, tanggal 25 Juli 2019, di Rumah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT, Kupang.

politisi perempuan yang baik. Organisasi sayap tersebut adalah Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Pada pemilu tahun 2014 dan 2019, dalam proses perekrutan Partai Golkar melakukan pembobotan berdasarkan kualitas, elektabilitas dan latar belakang caleg.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kader Partai Golkar yang ingin mendaftarkan diri sebagai kandidat caleg pada pemilu legislatif Provinsi NTT tahun 2014 dan 2019, jika memiliki keinginan maka partai akan mendukung. Selain itu, seperti dikatakan oleh Inche D.P. Sayuna, Partai Golkar melakukan rekrutmen dengan mempertimbangkan caleg yang berasal dari organisasi sayap KPPG karena merupakan sumber utama dalam rekrutmen perempuan caleg. Di KPPG terdapat juga kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan perempuan.

Terkait dengan proses penempatan nomor urut, Partai Golkar mengikuti regulasi yang berlaku bahwa harus ada keterwakilan perempuan. Terdapat banyak varian dalam penempatan nomor urut.

“Kalau kami di Partai Golkar itu seperti yang saya bilang tadi, *mindset* ketua itu menjadi penting, saya punya ketua ini baru-baru hampir semua rapat ini perempuan nomor 1, beliau kasih perempuan itu dinomor 1, 2, 3 di semua dapil. Baru pun kasih nomor 1 kalau perempuan itu potensial. Kemarin 1, 2, 3 kami kasih semua perempuan. Memang sangat menentukan *mindset* pimpinan partai.”⁷

Selanjutnya untuk mendukung kualitas caleg perempuan, Partai Golkar pada tahun 2019 ini membuka sekolah politik. Latar belakang dibukanya berdasarkan hasil evaluasi dari kelemahan-kelemahan pengkaderan di internal partai. Sebelumnya sudah dilakukan program pendidikan

⁷*Ibid.*

dan pelatihan (diklat) namun sifatnya umum, tidak fokus untuk mempersiapkan perempuan menduduki jabatan-jabatan politik. Di sekolah politik ini terdapat kurikulum yang menjawab semua kebutuhan untuk lima tahun ke depan, sehingga nantinya tidak ada kesulitan dalam mencari caleg perempuan seperti yang terjadi ditahun-tahun sebelumnya. Di sekolah politik ini para kader tidak hanya belajar tentang strategi caleg perempuan berhadapan dengan caleg laki-laki, melainkan juga politik nilai terutama terkait dengan isu perempuan dan anak, *gender mainstraming*, dan sebagainya. Ini semua menjadi prioritas Partai Golkar untuk menjadikan perempuan sebagai inspirasi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di NTT.

Terkait dengan penentuan dapil, pimpinan partai memberikan kebebasan kepada caleg yang telah memiliki basis yang merupakan asal caleg tersebut. Pada pemilu 2019 ini, pimpinan Partai Golkar memberikan kebebasan kepada perempuan dan anak muda untuk memilih dapil dan sekaligus memberikan nomor urut 1, 2, 3 kepada perempuan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT yaitu memprioritaskan perempuan dan anak muda.

Partai Golkar juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk mau terlibat dan berpartisipasi aktif di partai politik. Namun, seringkali di lapangan partai menemukan bahwa perempuan menginginkan hasil yang *instant* untuk menjadi wakil rakyat. Padahal sebagai kader partai, semua harus melalui proses pengkaderan dalam rangka mempersiapkan mental dan keterampilan untuk menjadi politisi yang berkualitas dan mampu menghadapi tekanan-tekanan.

Guna merespon permasalahan di atas, partai membuka sekolah politik untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada perempuan, sehingga pada saat

perempuan melakukan sosialisasi dan bertemu dengan masyarakat, perempuan sudah mempunyai kemampuan komunikasi yang baik untuk dapat meyakinkan masyarakat.

Keempat partai politik pengusung empat perempuan caleg ini berkomitmen penuh dalam memberikan kesempatan kepada perempuan sebagai kader partai. Selain karena amanah undang-undang, kehadiran perempuan dalam politik memberikan warna di perpolitikan Indonesia. Kehadiran perempuan memberikan sentuhan yang berbeda terutama berkaitan dengan isu-isu yang dekat dengan perempuan dan anak serta isu kesejahteraan, karena ini semua berangkat dari pengalaman perempuan di basis masyarakatnya.

Tabel 2.1
Pendapat Elit Partai Politik
terhadap Empat Perempuan Caleg pada Pemilu 2019

No	Partai Politik	Pendapat Elit Partai Politik
1	PDIP	<ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan perempuan caleg ada di kader; - Memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan; - Perempuan sudah bisa diterima oleh masyarakat NTT karena adanya keseimbangan gender dan keterbukaan; - Indikator perempuan layak karena mereka dipercaya dan dipilih oleh masyarakat; - Perempuan memiliki komunikasi yang baik; - Penentuan nomor urut berdasarkan pembobotan dari internal partai;

		<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan dapil diserahkan kepada perempuan caleg berdasarkan daerah asal (caleg, suami, keluarga besar).
2	Partai Nasdem	<ul style="list-style-type: none"> - Terbuka terhadap semua perempuan caleg yang memiliki kapasitas; - Memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai, walaupun laki-laki masih dominan; - Perempuan sudah bisa diterima oleh masyarakat NTT karena adanya kemajuan pendidikan dan ekonomi masyarakat; - Indikator perempuan layak karena mereka dipercaya dan dipilih oleh masyarakat; - Perempuan memiliki komunikasi yang baik; - Penentuan nomor urut berdasarkan pembobotan dari internal partai; - Pemilihan dapil diserahkan kepada perempuan caleg berdasarkan daerah asal (caleg, suami, keluarga besar).
3	PKB	<ul style="list-style-type: none"> - Terbuka terhadap semua caleg perempuan yang memiliki kapasitas; - Memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai, walaupun laki-laki masih dominan; - Perempuan sudah bisa diterima oleh masyarakat NTT, walaupun masih ada perempuan yang kurang yakin akan kemampuannya;

		<ul style="list-style-type: none"> - Indikator perempuan layak karena mereka dipercaya dan dipilih oleh masyarakat; - Perempuan memiliki komunikasi yang baik; - Penentuan nomor urut berdasarkan pembobotan dan regulasi partai; - Pemilihan dapil diserahkan kepada perempuan caleg berdasarkan daerah asal (caleg, suami, keluarga besar).
4	Partai Golkar	<ul style="list-style-type: none"> - Diprioritaskan kader partai, organisasi sayap Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG); - Memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai, fokus pada perempuan dan anak muda; - Perempuan sudah bisa diterima oleh masyarakat NTT karena memiliki komitmen kepada masyarakat; - Perempuan layak karena memiliki strategi dan ini diajarkan di sekolah politik partai; - Perempuan memiliki komunikasi yang baik; - Penentuan nomor urut berdasarkan pembobotan dari internal partai; - Pemilihan dapil diserahkan kepada perempuan caleg karena mereka yang tahu basisnya.

Sumber: Diolah oleh penulis

Walaupun representasi perempuan pada pemilu 2019 secara kuantitas belum memenuhi kuota 30 persen, namun ini patut dibanggakan. Dari segi politik, representasi enam

perempuan ini selain karena kehendak UU yang mengatur harus adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen, empat partai politik ini telah memberikan akses dan peluang yang sebesar-besarnya kepada perempuan untuk bergabung dalam partai sebagai kader.

Terkait dengan budaya NTT, terdapat perbedaan pendapat tentang keterlibatan perempuan dalam politik. NTT yang menganut sistem garis keturunan ayah, dalam kegiatan sosial politik dan budaya laki-laki mendapatkan posisi yang baik ketimbang perempuan. Namun dengan meningkatnya jenjang pendidikan dan kesadaran dalam politik, masyarakat dan partai politik memiliki kepercayaan kepada caleg perempuan. Setelah menjadi anggota legislatif, perempuan juga mendapatkan hati masyarakat, karena perempuan kembali untuk membantu masyarakat sesuai dengan janji yang disampaikan pada saat kampanye dan sosialisasi (masa reses). Perempuan tidak melakukan tipu-tipu pada saat kampanye, sebaliknya perempuan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di dapil masing-masing.

Sebagai solusi untuk merespon permasalahan budaya, partai memiliki strategi yaitu melalui pendidikan, sosialisasi kepada perempuan dan laki-laki mengenai pemahaman politik yang komprehensif, sehingga pada saat turun ke masyarakat mereka mempunyai kemampuan menganalisis dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor-faktor tersebut mencakup: konteks sosial budaya patriarki, proses seleksi dalam partai politik, kurangnya media membangun opini publik mengenai pentingnya

keterwakilan perempuan dalam parlemen dan tidak adanya jaringan antara organisasi massa dan partai politik dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan (Parwansa, 2002).

2.3 Tantangan Perempuan NTT dalam Politik

Menurut Matland dalam tulisan Khofifah Indar Parawansa (2002), rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. *Pertama*, sosial budaya di Indonesia yang masih sangat kental dengan budaya patriarki yang menuntut perempuan untuk tidak masuk di ranah politik dan pemerintahan. Politik dianggap sebagai ranah laki-laki. *Kedua*, proses seleksi di dalam partai politik yang didominasi oleh laki-laki sebagai pimpinan partai. *Ketiga*, peran media dalam membangun opini publik mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen. *Keempat*, minimnya jejaring di antara organisasi massa, LSM, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sungguh-sungguh memperjuangkan keterwakilan perempuan.

Dalam konteks NTT pun demikian, perempuan seringkali dianggap tidak mampu masuk politik, dianggap dapat mengabaikan tugasnya sebagai “pengurus” rumah tangga. Namun demikian, karena aturan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, partai politik berlomba “meminta” perempuan untuk bergabung dengan partai,⁸ selain tentu di dalam partai sendiri sudah memiliki kader yang mumpuni.

⁸ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petinggi partai politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (lihat pada sub bab sebelumnya)

Di NTT proses seleksi dan penempatan nomor urut serta penentuan dapil diserahkan kepada caleg perempuan. Ini menjadi kekuatan untuk perempuan guna kembali ke daerah asal masing-masing dan menjadi keuntungan buat partai politik. Walau masih ada media yang kurang memberitakan pentingnya keterwakilan perempuan, namun terdapat beberapa media yang mewartakan prestasi berdasarkan profesi caleg perempuan. Terkait dengan jejaring partai politik dan organisasi massa meski tidak banyak, tetapi terjalin kerja sama dan kesepakatan untuk mendorong perempuan masuk politik melalui isu-isu tentang perempuan dan anak. Menurut mereka isu-isu strategis ini harus melibatkan perempuan sehingga perempuan termotivasi untuk terjun di dunia politik dan menjadi caleg.

Pada pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi NTT, terdapat 11 partai politik yang menjadi peserta. Partai-partai tersebut adalah PDIP dan Golkar meraih 10 kursi, Nasdem 9 kursi, PKB dan Perindo dengan 7 kursi, Gerindra dan PAN mendapat 6 kursi, Hanura dengan 5 kursi, Demokrat 4 kursi serta PPP dan PSI memperoleh masing-masing 1 kursi. Dari total 65 orang tersebut terdiri dari 53 laki-laki atau 81,54 persen dan 12 perempuan atau 18,46 persen. Walaupun peraturan perundangan mendukung keterlibatan perempuan di bidang politik, pada kenyataannya hal ini tidak terlihat dari jumlah perempuan anggota legislatif yang terpilih.

Partai politik merupakan kendaraan atau prasyarat bagi pencalonan anggota legislatif. Karena itu perempuan saat masuk ke arena politik harus melalui proses di partai politik yang mayoritasnya adalah laki-laki baik secara kuantitas maupun kualitas. Dominasi laki-laki dalam partai politik tidak terlepas dari pandangan sosial budaya yang

merupakan refleksi nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat.

Oleh karena itu, minimnya jumlah perempuan dalam politik dan yang terlibat aktif dalam partai politik merupakan cerminan budaya masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi berat karena kuatnya budaya patriarki, di mana dunia politik adalah dunia milik laki-laki. Hal ini didukung dengan mayoritas susunan pengurus partai-partai politik di NTT yang adalah laki-laki, sedangkan perempuan tidak ada pada posisi pimpinan tertinggi.

Pembahasan mengenai dominasi laki-laki dalam politik dikaitkan erat dengan kuatnya budaya patriarki, seperti yang disampaikan Sylvia Walby (1990) dalam bukunya yang berjudul *Theorizing Patriarchy*. Patriarki sebagai sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Terdapat dua bentuk utama patriarki, yaitu privat dan publik. Dalam bentuk patriarki privat, arena utama penindasan perempuan terletak pada produksi rumah tangga, dengan seorang patriarki mengontrol perempuan secara individu di dalam rumah. Sedangkan bentuk patriarki publik terletak pada pekerjaan dan negara. Selain itu, politik yang berada di ruang publik juga banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki baik dalam kebijakan maupun praktiknya. Hal ini menyebabkan perempuan dalam politik mengalami hambatan yang berakar dari budaya patriarki, baik yang berasal dari individu maupun institusi.

Berdasarkan hasil kajian LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), menunjukkan bahwa pola rekrutmen masih cenderung mengikuti atau ditentukan faktor-faktor primordial seperti agama, kesamaan daerah, kedekatan dan kesediaan dengan pimpinan teras partai politik. Lebih lanjut Pusat Penelitian Politik LIPI bekerja

sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI menemukan bahwa masih begitu kuatnya dominasi pimpinan partai dalam proses seleksi dan kandidasi calon-calon anggota legislatif di Indonesia (Dewi, 2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa petinggi partai mengakui bahwa sebagaimana besar kepengurusan harian partai politik dipegang oleh laki-laki. Perempuan masuk dalam kepengurusan partai sebagai prasyarat dalam partai politik untuk mengikuti pemilu, dan salah satu alasan laki-laki mendominasi partai karena sudah lama menjadi kader partai. Partai politik memberikan kebebasan terhadap perempuan untuk terlibat aktif, namun keterlibatan perempuan lebih banyak pada posisi yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan, kegiatan sosial dan keagamaan. Hal ini merupakan kehendak dan keinginan dari perempuan anggota partai tersebut.

Di Provinsi NTT terdapat delapan dapil yang memperebutkan 65 kursi. Berdasarkan wawancara dengan petinggi partai politik (PDIP, Nasdem, PKB dan Golkar) di Provinsi NTT, setiap partai politik mempunyai pertimbangan sendiri siapa yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif, demikian halnya dengan penentuan nomor urut dan dapil mana bakal calon akan ditempatkan.

Pada pemilu 2019, perempuan mendapatkan kekhususan untuk menentukan dapil, dan dari hasil wawancara dan penelusuran dokumen, empat perempuan caleg ini mendapatkan dapil berdasarkan asal daerah mereka masing-masing. Adoe Yuliana Elisabeth memilih dapil Kota Kupang tempat ia berkerja dan tinggal. Kristien Samiyati yang merupakan orang asli Kabupaten Sumba memilih dapil Kabupaten Sumba karena orang tua berasal dari Sumba dan memiliki keluarga besar di Kabupaten Sumba. Ana Waha Kolin memilih sendiri dapil di Kabupaten Flores Timur karena daerah asal orang tua dan keluarga besar. Dan

terakhir Inche D.P. Sayuna yang memilih sendiri dapil Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) karena merupakan tempat asalnya dan daerah binaannya.

Penentuan dapil di NTT oleh pemimpin partai politik memang memprioritaskan perempuan berdasarkan dapil karena masing-masing mereka sudah memiliki basis masyarakat baik dari orang tua, suami, keluarga dan komunitas. Jadi dalam menentukan dapil, empat perempuan ini cenderung aman karena pimpinan partai memberikan kebebasan untuk menentukan dapil masing-masing.

Selain itu, perempuan juga mengalami masalah lain untuk dapat terlibat aktif dalam politik, yaitu:

Pertama, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Partai politik sering kali mengalami kesulitan dalam merekrut perempuan yang memiliki kemampuan politik sebanding dengan laki-laki, walaupun perempuan memiliki kapasitas dan kapabilitas politik yang memadai cenderung memilih peran non-partisan.

Kedua, faktor keluarga. Perempuan yang telah berkeluarga sering mengalami hambatan, khususnya persoalan izin dari suami. Banyak keluarga cenderung menolak pandangan dan aktivitas tambahan perempuan di luar rumah. Kegiatan-kegiatan politik umumnya membutuhkan tingkat keterwakilan yang tinggi dan penyediaan waktu dan finansial yang besar, sedangkan kebanyakan perempuan sering memangku jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial.

Ketiga, sistem multi-partai. Besarnya jumlah partai politik yang bersaing dalam pemilu untuk mencari kursi parlemen memengaruhi tingkat keterwakilan perempuan, karena setiap parpol berharap bisa memperoleh sejumlah kursi di parlemen. Ada kecenderungan untuk membagi jumlah kursi yang terbatas diantara laki-laki saja dan ini secara langsung

berpengaruh terhadap tingkat keterwakilan perempuan (Parawansa, 2005).

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat beberapa cara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, yaitu:

Pertama, membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan. Jaringan ini memiliki potensi dan posisi penting dalam mendukung perempuan baik dari segi jumlah maupun kualitas. *Kedua*, meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik. Upaya dilakukan dengan mendorong perempuan menduduki posisi strategis dalam partai, sebagai pembuat keputusan tentang kebijakan partai serta daftar urut calon anggota legislatif.

Ketiga, melakukan advokasi terhadap pimpinan partai. Hal ini penting untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen.

Keempat, membangun akses ke media, dengan tujuan memengaruhi opini pimpinan partai dan masyarakat umum.

Kelima, meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat rasa percaya diri akan kemampuan dalam bersaing dengan laki-laki menjadi anggota parlemen.

Keenam, meningkatkan kualitas perempuan, dalam akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Ketujuh, memberikan kuota lebih untuk meningkatkan lagi jumlah perempuan (Matland, 2001; Bassell, 2004; Parawansa, 2005; Kasim 2014).

Bab 3

Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2019 di DPRD Provinsi NTT

3.1 Perempuan di DPRD Provinsi NTT Era Reformasi

Bagian ini menjelaskan mengenai representasi perempuan NTT di era Reformasi, dimulai dengan menjelaskan representasi perempuan pada pemilu 2014. Jumlah anggota DPRD Provinsi NTT hasil pemilu 2014 adalah 65 orang, yang terdiri dari 59 laki-laki (90,8 persen) dan enam perempuan (9,2 persen). Dari sepuluh partai politik peraih kursi DPRD Provinsi NTT 2014-2019 terdapat empat partai politik yang tidak ada anggota perempuan terpilih yaitu PKS, Gerindra, Demokrat dan PKPI. Sedangkan partai-partai yang memiliki anggota perempuan terpilih masing-masing satu orang berasal dari Nasdem, PKB, PDIP, Golkar, PAN dan Hanura.

Tabel 3.1
Anggota DPRD Provinsi NTT Pemilu 2014
menurut Jenis Kelamin

No	Partai Politik	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	Partai Nasdem	1	7	8
2	PKB	1	4	5
3	PKS	-	2	2
4	PDIP	1	9	10
5	Golkar	1	10	11
6	Gerindra	-	8	8
7	Demokrat	-	8	8
8	PAN	1	4	5
9	Hanura	1	4	5

10	PKPI	-	3	3
	Jumlah	6	59	65

Sumber: KPU Provinsi NTT

Dalam perjalanannya, pada tahun 2017 dan 2018 keterwakilan perempuan anggota legislatif bertambah tiga orang, masing-masing satu orang dari PDIP, Gerindra dan Demokrat. Jadi total keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi NTT 2014-2019 adalah 9 orang. Ini merupakan sejarah baru banyaknya keterwakilan perempuan di NTT. Namun demikian dalam penelitian ini, akan fokus pada enam perempuan dengan pertimbangan enam perempuan ini terpilih pada pemilu 2014 dan ikut dalam penyusunan perda responsif gender pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dengan isu kesehatan, lingkungan hidup dan tenaga kerja, di mana ketiga perda tersebut disahkan pada tahun 2016.

Pada masa Orde Baru, keterwakilan perempuan NTT di DPRD pada tahun 1992-1997 mencapai tujuh orang, namun pada era Reformasi keterwakilan perempuan cenderung menurun. Baru pada pemilu 2014 dan pemilu 2019 keterwakilan perempuan meningkat signifikan.

Pada pemilu 1999 keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi NTT adalah 2 orang (3,8 persen), laki-laki 96,2 persen dari total 54 orang. Posisi tertinggi adalah DPRD Provinsi Jawa Timur dengan keterwakilan perempuan 11 orang (10,6 persen), laki-laki 89,4 persen dari total 104 orang. Posisi kedua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan keterwakilan perempuan 10 orang (12,7 persen), laki-laki 87,3% dari total 79 orang. Posisi ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan keterwakilan perempuan tujuh orang (7,9 persen), laki-laki 82 persen dari total 89 orang. Posisi ketiga DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan keterwakilan perempuan enam orang (10,1 persen), laki-laki 89,9 persen

dari total 59 orang. Posisi keempat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan keterwakilan perempuan 5 orang (10,2 persen), laki-laki 89,8 persen dari total 49 orang. Posisi kelima DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan keterwakilan perempuan empat orang (8,2 persen), laki-laki 91,8 persen dari total 49 orang. Pada pemilu 2004, keterwakilan perempuan mengalami peningkatan yakni berjumlah empat orang.

Pada pemilu 2014 di DPRD Provinsi NTT, caleg perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif berjumlah enam orang, dengan rincian satu orang petahana dan lima orang baru. Hal ini tentu saja masih jauh dari ketentuan angka *affirmative action* 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif. Berikut ini jumlah anggota DPRD Provinsi NTT dari masa ke masa berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3.2
Jumlah Anggota DPRD Provinsi NTT
dari Masa ke Masa menurut Jenis Kelamin

No	Periode	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tahun 1959	23	0	23
	Golkar	22	2	24
2	Tahun 1960	23	0	23
	Golkar	22	2	24
3	Tahun 1961	23	0	23
	Golkar	22	1	23
4	Tahun 1962	11	0	11
	Golkar	11	1	12
5	Tahun 1963	12	0	12
	Golkar	10	1	11
6	Tahun 1964	13	0	13
	Golkar	12	1	13
7	Tahun 1965	15	0	15
	Golkar	14	1	15

8	Tahun 1966 Golkar	13 13	0 1	13 14
9	Tahun 1967 Golkar	14 12	0 1	14 13
10	Tahun 1968 Golkar	20 19	0 1	20 20
11	Tahun 1969 Golkar	20 19	0 1	20 20
12	Tahun 1970/1971 Golkar	25 23	0 2	25 25
13	1971-1977	37	3	40
14	1977-1982	37	3	40
15	1982-1987	37	3	40
16	1987-1992	41	4	45
17	1992-1997	38	7	45
18	1997-1999	41	4	45
19	1999-2004	52	2	54
20	2004-2009	51	4	55
21	2009-2014	51	4	55
22	2014-2019	58	6	65
23	2019-2024	53	12	65

Sumber: DPRD Provinsi NTT

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1950-an sampai akhir tahun 1970-an tidak ada keterwakilan perempuan anggota DPRD Provinsi NTT yang berasal dari partai politik, hanya terdapat satu perempuan yang berasal dari perwakilan wanita. Pada masa Orde Baru, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi NTT cenderung membaik, dan keterwakilan perempuan semua berasal dari Partai Golkar.

Pada era Reformasi, keterwakilan perempuan pada pemilu 1999 menurun menjadi dua orang, hanya 3,8 persen dan laki-laki 96,2 persen dari total 54 orang. Pada pemilu 2004 keterwakilan perempuan meningkat menjadi empat

orang, pada pemilu 2009 keterwakilan perempuan tetap empat orang, dan pemilu 2014 keterwakilan perempuan enam orang ditambah tiga orang pada Pergantian Antar Waktu (PAW) di tahun 2017 dan 2018, sedangkan pada pemilu 2019 keterwakilan perempuan meningkat menjadi 12 orang.

Selanjutnya jumlah caleg perempuan pada pemilu 2014 berdasarkan delapan dapil di NTT. Sesuai dengan aturan, maka setiap partai politik wajib memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Dari delapan dapil di NTT total caleg perempuan berjumlah 271 orang sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Jumlah Perempuan Caleg DPRD Provinsi NTT
Pemilu 2014

No Urut	Partai Politik	Daerah Pemilihan								Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Partai Nasdem	2	3	3	3	4	3	3	2	23
2	PKB	2	3	3	3	4	3	3	2	23
3	PKS	2	2	2	3	4	3	3	2	21
4	PDIP	2	3	3	3	4	3	3	2	23
5	Golkar	2	3	3	3	4	3	3	2	23
6	Gerindra	2	3	3	3	4	3	3	2	23
7	Demokrat	2	3	3	3	4	3	3	2	23
8	PAN	2	3	3	3	4	3	3	2	23
9	PPP	2	3	2	2	3	3	3	2	20
10	Hanura	2	3	3	3	4	3	3	2	23
11	PBB	2	3	3	3	4	3	3	2	23
12	PKPI	2	3	3	3	4	3	3	2	23
	Jumlah	24	35	34	35	47	36	36	24	271

Sumber: KPU Provinsi NTT

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan caleg yang maju dalam pemilu 2014 sebanyak 271 orang dari 12 partai politik. Perempuan caleg yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi NTT 2014-2019 adalah enam orang dari total 65 orang anggota DPRD. Jumlah perempuan caleg yang diusulkan oleh partai politik rata-rata sama untuk setiap dapil yaitu untuk memenuhi kuota 30 persen.

Selanjutnya perolehan kursi partai politik pada pemilu 2014, di mana Golkar dan PDIP menduduki posisi teratas dengan jumlah masing-masing 11 orang dan 10 orang. Disusul oleh Nasdem, Gerindra dan Demokrat dengan masing-masing 8 orang. Kemudian PKB, PAN dan Hanura dengan masing-masing meraih lima orang, dan PKPI tiga orang serta PKS dua orang. Dua partai yang tidak lolos yaitu PPP dan PBB.

Tabel 3.4
Perolehan Kursi Partai Politik
DPRD Provinsi NTT Pemilu 2014

No Urut	Partai Politik	Daerah Pemilihan								Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Partai Nasdem	1	1	1	1	1	1	1	1	8
2	PKB	0	1	1	1	1	0	0	1	5
3	PKS	0	0	0	1	0	1	0	0	2
4	PDIP	1	1	2	1	2	1	2	0	10
5	Golkar	1	1	2	1	2	1	2	1	11
6	Gerindra	1	1	1	1	1	1	1	1	8
7	Demokrat	1	1	1	1	1	1	1	1	8
8	PAN	0	0	1	1	1	1	1	0	5
9	PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hanura	1	1	1	1	1	0	0	0	5
14	PBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PKPI	0	0	0	1	1	0	0	1	3

	Jumlah	6	7	10	10	11	7	8	6	65
--	--------	---	---	----	----	----	---	---	---	----

Sumber: KPU Provinsi NTT

Partai Golkar merupakan partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi NTT, kemudian PDIP, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Hanura, PKPI dan PKS. Total ada 10 partai politik yang duduk di DPRD Provinsi NTT 2014-2019.

Dari total 65 anggota legislatif yang terpilih, keterwakilan perempuan hanya enam orang. Jumlah ini memang belum memenuhi kuota 30 persen, namun secara kuantitas keterwakilan perempuan mengalami kenaikan dari sebelumnya tiga orang menjadi enam orang dan ditambah dengan tiga orang PAW menjadi 9 orang. Berikut ini enam perempuan yang terpilih dalam pemilu 2014.

Tabel 3.5
Perolehan Suara Calon Terpilih Perempuan
Anggota DPRD Provinsi NTT Pemilu 2014

Asal Parpol	No Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Dapil	Jumlah Suara Sah	Peringkat Suara Sah
Nasdem	8	Kristien Samiyati	III	8.331	1
Golkar	6	Adriana Kossi	III	14.207	1
PDIP	1	Kristofora Bantang	IV	10.922	1
PAN	1	Yeni Veronika	IV	23.100	1
Hanura	3	Angela Piwung	V	7.047	1
PKB	2	Aleta Baun	VIII	3.897	1

Sumber: KPU Provinsi NTT

PDIP dan PAN masing-masing menempatkan Kristofora Bantang dan Yeni Veronika di nomor urut 1, PKB

dan Hanura menempatkan Aleta Baun dan Angela Piwung di nomor urut 2 dan 3, sedangkan Golkar dan Nasdem menempatkan Adriana Kossi dan Kristien Samiyati di nomor urut besar (6 dan 8). Keenam perempuan ini mendapat suara sah dan terpilih.

3.2 Perempuan Caleg Terpilih pada Pemilu 2019 di DPRD Provinsi NTT

Jumlah anggota DPRD Provinsi NTT hasil Pemilu 2019 adalah 65 orang yang terdiri dari 53 laki-laki atau 81,54 persen dan 12 perempuan atau 18,46 persen. Berikut ini perolehan kursi partai-partai politik di DPRD Provinsi NTT pada Pemilu 2019.

Tabel 3.6
Perolehan Kursi Partai Politik
DPRD Provinsi NTT Pemilu 2019

No	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PDIP	8	2	10
2	Partai Golkar	9	1	10
3	Partai Nasdem	8	1	9
4	PKB	5	2	7
5	Perindo	5	2	7
6	Partai Gerindra	6	-	6
7	PAN	3	3	6
8	Partai Hanura	5	-	5
9	Demokrat	3	1	4
10	PPP	1	-	1
11	PSI	1	-	1

Sumber: KPU Provinsi NTT

Dari sebelas partai peraih kursi DPRD Provinsi NTT 2019-2024, terdapat empat partai yang tidak memiliki keterwakilan perempuan terpilih yaitu Gerindra, Hanura, PPP dan PSI. Sedangkan keterwakilan perempuan dipersembahkan oleh PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Perindo, PAN dan Demokrat.

Pada pemilu 2019 terdapat 12 perempuan anggota DPRD NTT (18,47 persen dari 65 anggota legislatif), empat diantaranya adalah petahana yang terpilih kembali kedua kalinya. Kedua belas perempuan anggota DPRD NTT periode 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Perempuan Anggota DPRD NTT Periode 2019-2024

No	Dapil	Nama	Partai	No Urut
1	NTT I (Kota Kupang)	Adoe Yuliana Elisabeth	PDIP	1
2	NTT II (Kab Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua)	Maria Saku	Perindo	1
3	NTT III (Pulau Sumba yakni Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya)	Kristien Samiyati Pati	Nasdem	1
4	NTT III (Pulau Sumba yakni Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat,	Rambu K. A. Praing	PAN	2

	Sumba Barat Daya)			
5	NTT III (Pulau Sumba yakni Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya)	Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka	Perindo	3
6	NTT IV (Kab Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur)	Yeni Veronika	PAN	1
7	NTT IV (Kab Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur)	Jimur Siena Katrina	PAN	4
8	NTT V (Kab Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo)	Angela Mercy Piwung	PKB	5
9	NTT VI (Kab Flores Timur, Lembata, Alor)	Ana Waha Kolin	PKB	1
10	NTT VIII (Kab Timor Tengah Selatan)	Inche D.P. Sayuna	Golkar	1
11	NTT VIII (Kab Timor Tengah Selatan)	Emelia Julia Nomleni	PDIP	1
12	NTT VIII (Kab Timor Tengah Selatan)	Reny Marlina Un	Demokrasi	1

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Perempuan anggota DPRD NTT periode 2019-2024 ini ikut dalam kontestasi politik elektoral karena mendapatkan dukungan dari keluarga besar (*extended family*). Empat orang merupakan petahana yaitu Kristien Samiyati, Yeni Veronika, Angela Mercy Piwung dan Renny Marlina Un. Sedangkan delapan perempuan lain pertama kali mengikuti pemilu dan terpilih menjadi anggota legislatif. Awalnya sebgaaian dari 12 perempuan caleg ini ragu untuk masuk dalam partai politik, namun karena dukungan yang besar dari keluarga yang mendorong mereka untuk masuk dan ikut dalam kontestasi politik elektoral. Sebagian besar partai politik mendukung perempuan ini dengan memberikan nomor urut 1 yaitu: Adoe Yuliana Elisabeth dari PDIP, Maria Saku dari Perindo, Kristien Samiyati Pati dari Nasdem, Yeni Veronika dari PAN, Ana Waha Kolin dari PKB, Inche D.P. Sayuna dari Golkar, Emelia Julia Nomleni dari PDIP dan Reny Marlina Un dari Demokrat.

Selain itu, latar belakang dan pengalaman politik 12 perempuan ini menjadi pertimbangan partai politik “meminta” mereka untuk bergabung dengan partai selain karena amanat UU yang mengharuskan memenuhi kuota 30 persen. Berikut ini adalah latar belakang dan pengalaman politik 12 perempuan anggota DPRD NTT periode 2019-2024.

Tabel 3.8
Latar Belakang Perempuan Caleg Terpilih
Pada Pemilu 2019

No	Nama	Keterangan
1	Adoe Yuliana Elisabeth	- Pengurus DPD PDIP NTT - Caleg DPRD NTT dalam pemilu 2004, 2009, 2014
2	Maria Saku	- Wakil ketua DPRD Kab Kupang 2009-2014

		- Mantan Ketua DPC PDIP Kab Kupang
3	Kristien Samiyati Pati	- Anggora DPRD NTT 2014-2019 - Pengurus DPW Partai Nasdem NTT
4	Rambu K. A. Praing	- Pendatang baru
5	Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka	- Pendatang baru
6	Yeni Veronika	- Anggota DPRD NTT 2014-2019 - Ketua PKK Kab Manggarai 2015-2020
7	Jimur Siena Katrina	- Pengurus DPP PAN
8	Angela Mercy Piwung	- Anggota DPRD NTT 2009-2014 - Anggota DPRD NTT 2014-2019 - Anggota DPRD NTT 2019-2024
9	Ana Waha Kolin	- Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Prov. NTT 2009-2014 - Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Prov. NTT 2014-2019 - Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Prov. NTT 2019-2024 - Pengurus PKB NTT - Caleg DPRD NTT dalam pemilu 2009 dan 2014
10	Inche D.P. Sayuna	- Sekretaris DPD Partai Golkar NTT - Anggota DPRD NTT 2019-2024 - Akademisi
11	Emelia Julia Nomleni	- Mantan Ketua DPC PDIP Kab TTS - Anggota DPRD NTT 2004-2014 - Ketua DPRD NTT 2019-2024 - Ketua DPD PDIP NTT - Calon Wakil Gubernur NTT 2018
12	Reny Marlina Un	- Anggota DPRD NTT 2018-2019 - Caleg DPRD dalam pemilu 2014 - Akademisi - Praktisi pendidikan informal

Sumber: (Dalupe, 2020)

Tabel tersebut menunjukkan latar belakang dan pengalaman politik 12 perempuan caleg mendukung mereka untuk masuk dalam politik dan terpilih menjadi anggota DPRD dalam pemilu 2019. Terdapat empat orang petahana (Kristien Samiyati, Yeni Veronika, Angela Mercy Piwung dan Renny Marlina Un) yang juga merupakan pengurus partai politik ditingkat provinsi maupun kabupaten, dan ketua organisasi PKK di Kab Manggarai. Terdapat dua orang (Rambu K. A. Praing dan Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka) yang merupakan caleg baru dalam pemilu 2019, mereka berusia muda dan baru menyelesaikan pendidikan S1 dari perguruan tinggi. Keterpilihan dua perempuan caleg ini dipengaruhi oleh figur laki-laki (ayah), di mana Rambu K.A Praing merupakan putri dari Chris Praing, seorang keturunan bangsawan yang memiliki pengaruh besar dalam politik lokal di Sumba Timur, calon bupati dalam pilkada 2020 di Sumba Timur. Sementara Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka merupakan putri politisi Perindo di Sumba Barat Daya yang juga pengusaha setempat.

Hal ini juga menunjukkan bagaimana pengalaman panjang perempuan caleg sebagai pengurus partai, kader partai, akademisi, ketua organisasi dan lembaga lainnya. Pengalaman politik ini merupakan modal individu yang dimiliki oleh perempuan caleg yang tentu saja berkorelasi dengan keterpilihan mereka dalam pemilu. Kemenangan mereka dalam pemilu dilandasi oleh kepercayaan dari konstituen dan dukungan serta jaringan yang dimiliki oleh perempuan caleg di dapil masing-masing.

Kemenangan perempuan caleg ini tentu saja tidak mudah, mereka memerlukan dukungan kepercayaan, dan jaringan yang kuat serta figur untuk menjadi anggota DPRD. Perempuan caleg di NTT memanfaatkan modal sosial (jaringan, norma dan kepercayaan) yang dimiliki untuk meraih kemenangan dalam pemilu di tingkat lokal.

3.3 Pengalaman Empat Perempuan Caleg Terpilih

Bagian ini menjelaskan pengalaman empat perempuan caleg terpilih pada pemilu 2019 dengan sebelumnya memaparkan motivasi awal dan latar belakang masuk politik. Setelah itu akan dijelaskan bagaimana empat perempuan caleg ini memanfaatkan modal sosial dan modal moral (*moral capital*) dalam politik dengan dukungan budaya patriarki melalui nama besar laki-laki yaitu suami dan ayah serta keluarga besar empat perempuan caleg.

Adapun pertimbangan empat perempuan ini adalah komposisi asal partainya yaitu PDIP, Nasdem, PKB dan Golkar yang masing-masing berjumlah satu orang; perwakilan dari pulau besar di NTT yaitu Sumba, Flores, dan Timor. Keempat perempuan caleg ini sudah pernah mengikuti pemilu dan terpilih, yaitu Kristien Samiyati pada pemilu 2014, Inche D.P Sayuna pemilu 2009. Sementara dua orang lainnya yakni Adoe Yuliana Elisabeth dan Ana Waha Kolin baru terpilih pada pemilu 2019.

Keempat perempuan caleg ini memegang posisi dalam kepengurusan partai baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Berikut ini adalah profil keempat perempuan caleg tersebut.

Tabel 3.9
Profil Empat Perempuan Caleg Terpilih
DPRD Provinsi NTT 2019-2024

No	Nama	Dapil	No Urut dan Suara	Pengalaman di DPRD	Latar Belakang
1	Adoe Yuliana Elisabeth	I	1 4.149	Tidak ada	- Pengurus DPD PDIP NTT

					<ul style="list-style-type: none"> - Caleg DPRD NTT dalam pemilu 2004, 2009, 2014 - Aktivis
2	Kristien Samiyati	III	1 12.317	DPRD Prov NTT 2014-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus DPW Partai Nasdem NTT - Ayah pengurus partai - Pengusaha kuliner - Guru
3	Ana Waha Kolin	VI	1 6.282	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi NTT sejak 2019 sampai 2024 - Pengurus PKB NTT - Aktivis
4	Inche D.P. Sayuna	VIII	1 13.098	DPRD Provinsi 2009-2014	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris DPP Partai Golkar NTT - Akademisi, advokat

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan profil empat perempuan caleg tersebut, terdapat kecenderungan sistem pemilu proporsional terbuka berpengaruh dalam rekrutmen dan seleksi penempatan nomor urut caleg oleh partai politik. Perolehan suara empat perempuan ini umumnya sangat penting dengan menempatkan mereka di nomor urut 1. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat potensial bagi partai untuk mendapatkan kursi.

Berikut ini pengalaman empat perempuan caleg terpilih mulai dari motivasi dan latar belakang masuk politik, profesi, dukungan suami, orang tua (ayah), dan keluarga besar, serta bagaimana mereka memanfaatkan modal sosial dan *moral capital* yang dimiliki untuk maju dan terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi NTT tahun 2019-2024.

Adoe Yuliana Elisabeth

Adoe Yuliana Elisabeth tertarik pada politik sejak kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang NTT. Pada tahun 1998, ia terlibat aktif dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai pengurus dan sering terlibat dalam kegiatan sosial politik sebagai *master of ceremony* (MC), disini ia banyak bertemu dengan senior yang merupakan kader partai politik.

“Saya punya kegiatan ekstra itu saya masuk ke kegiatan organisasi GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yah saya juga sebagai pengurus disana pada tahun 1998 ketika hampir selesai mau kuliah itu saya sering dimintai menjadi MC untuk beberapa kebetulan senior-senior saya ada yang bekerja di PKBI dan ada juga yang di partai

politik PDIP saya diminta setiap momen kegiatan PDIP itu diminta jadi MC.”⁹

Awalnya Adoe Yuliana Elisabeth berpikir perempuan sedikit masuk politik karena stereotype, namun dengan banyak terlibat di kegiatan partai politik, ia semakin percaya diri dan mengembangkan diri dalam kegiatan-kegiatan aktivis, LSM dan pemberdayaan perempuan. Dengan aktivitasnya sebagai MC dalam kegiatan partai politik, ia menjadi tertarik untuk bergabung dengan PDIP.

“Awalnya tahun 2000 ketika dilaksanakan Konferda PDIP pertama dan saat itu tidak ada kader perempuan, saya diminta sama senior untuk bergabung dan saya pikir kenapa tidak. Akhirnya saya masuk dan saya pikir ini untuk pengembangan diri dulu, karena menurut saya ini kesempatan bagus di mana situasi saat itu belum terlalu bagus. Saya langsung diminta menjadi wakil ketua di provinsi. Dan sampai saat ini saya sudah empat periode menjadi pengurus di DPP PDIP NTT.”

Walaupun awalnya Adoe Yuliana Elisabeth hanya mengambil kesempatan masuk partai politik sebagai ajang untuk pengembangan diri, namun ia menjadi tertarik dan serius untuk terlibat dalam partai politik, ini terlihat dari posisinya sebagai wakil ketua dan empat tahun menjadi pengurus di DPP PDIP NTT. Selain karena kemampuannya, ia dipercaya oleh elit PDIP yang mayoritas adalah laki-laki.

Dengan latar belakangnya sebagai pekerja di jaringan masyarakat adat NTT, Adoe Yuliana Elisabeth tetap konsisten aktif di PDIP. Sebagai rekan pekerja di jaringan, ia

⁹ Wawancara dengan Adoe Yuliana Elisabeth, perempuan caleg dari PDIP, Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

mendapatkan banyak tantangan di mana ia harus memilih menjadi pekerja sosial atau kader partai politik.

“Pada waktu itu saya juga sementara ketika menjadi pengurus itu saya juga sedang di bekerja di jaringan gerakan masyarakat adat di NTT. Dalam perjalanan setelah teman-teman mengetahui saya ini kader partai, maka saya disuruh memilih ikut partai atau terlibat terus di dalam jaringan gerakan masyarakat adat. Pada waktu itu saya memilih partai karena memang saya agak tersinggung dibilang kacung Megawati.”

Adoe Yuliana Elisabeth mendapat respon yang tidak menyenangkan dari rekan kerjanya di jaringan, hal inilah yang membuat ia tidak nyaman sampai akhirnya memilih keluar dari jaringan. Memang bila dilihat partai politik dalam pandangan sebagian masyarakat bukannya tempat yang ramah buat perempuan. Di PDIP sendiri, posisinya dekat dengan kegiatan pemberdayaan perempuan, artinya walaupun tidak bekerja lagi dengan jaringan masyarakat adat, namun ia masih aktif melakukan kegiatan pemberdayaan termasuk pemberdayaan masyarakat adat.

Selama menjadi kader PDIP, Adoe Yuliana Elisabeth sudah empat kali mengikuti pemilu sebagai caleg, namun ia belum berhasil terpilih. Pemilu pertama 2004 saat sistem menggunakan suara terbanyak, ia diberikan nomor urut 3 di dapil Kota Kupang, Rote dan Sabu. Pemilu kedua 2009 ia masih dengan nomor urut 3 dengan dapil yang sama. Pada pemilu ketiga 2014 terjadi perubahan dapil yaitu dapil Kota Kupang dan ia mendapatkan nomor urut 2, namun belum juga terpilih, baru pada pemilu keempat tahun 2019 ia terpilih setelah ditempatkan di nomor urut 1.

Pada saat pertama kali mengikuti pemilu, ia hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota 30 persen suara perempuan. Ia berminat namun tidak memaksakan diri

untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Baru pada pemilu kedua, ia berpikir bahwa ia masuk dalam partai politik untuk dapat terpilih sebagai wakil rakyat. Selain itu, terdapat tantangan dari sistem pemilu itu sendiri, di mana sistem suara terbanyak membuat perempuan caleg mengalami kesulitan. Situasi ini diperparah dengan akses dan mobilitas perempuan caleg yang terbatas dibandingkan laki-laki caleg yang sebelumnya telah memiliki sumber daya dan akses di masyarakat serta memiliki konstituen setia.

Dalam menghadapi pemilu 2019, Adoe Yuliana Elisabeth menggunakan pendekatan berbeda yaitu dengan menghubungi teman-teman, tokoh masyarakat, politisi di Kota Kupang karena dapilnya saat itu adalah dapil Kota Kupang (sebelumnya dapil Kota Kupang, Rote dan Sabu). Selain itu, ia menggunakan jaringan keluarga besar yang merupakan tim suksesnya.

“Saya sepenuhnya didukung oleh keluarga suami saya dan adik-adik saya, kemudian saya punya jaringan kelompok arisan dan pengelompokan pertemanan disana juga tidak sama tapi tetapi ada beberapa kelompok arisan itu yang mensupport saya.”

Adoe Yuliana Elisabeth menggunakan jaringan keluarga terutama dari keluarga besar suami. Arisan keluarga ini merupakan arisan keluarga besar suami yang berasal dari Flores Kabupaten Manggarai. Ia sendiri berasal dari Kabupaten Rote yang dibesarkan di Flores Kabupaten Manggarai. Dalam kelompok arisan, ia memiliki tiga kelompok arisan yaitu keluarga inti dari suami, dari orang tua suami yang terdiri dari ayah dan ibu. Ketiga kelompok arisan ini adalah kekuatan suami Adoe Yuliana Elisabeth di Kota Kupang, dan mereka ini merupakan tim sukses dalam pemilu 2019 yang lalu.

Pada pemilu 2019, di masa kampanyenya ia melakukan kunjungan dan menyosialisasikan diri dengan *door to door* ke masyarakat dibantu oleh komunitas arisan keluarga besar dari suami. Cara ini efektif walaupun tantangannya cukup berat karena memakan waktu yang lama dan lokasi yang berpindah-pindah. Selain lain, terdapat tantangan lain, sebagai partai besar di NTT khususnya di Kota Kupang, Adoe Yuliana Elisabeth harus bersaing dengan kader lainnya yang merupakan tokoh besar di Kota Kupang seperti mantan Walikota Kupang, tokoh lain yang memiliki modal finansial kuat, dan tokoh muslim senior. Tidak sedikit masyarakat yang dikunjunginya meragukan ia sebagai perempuan caleg karena harus bersaing dengan laki-laki caleg populer di Kota Kupang.

Dengan latar belakangnya sebagai aktivis yang bergerak di pemberdayaan masyarakat, Adoe Yuliana Elisabeth banyak menyosialisasikan pentingnya pemberdayaan terutama bagi perempuan, khususnya tentang kepemimpinan untuk memotivasi perempuan masuk dalam partai politik. Unsur ini banyak diterima oleh masyarakat selain juga konsistensi yang dilakukannya dengan terus mendatangi dapil ditemani keluarga besar suami melalui kelompok arisan keluarga Flores Manggarai.

Berdasarkan paparan Adoe Yuliana Elisabeth ini, latar belakangnya sebagai aktivis pemberdayaan masyarakat serta pengalaman organisasi di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang mendorongnya masuk dalam politik. Kemudian faktor keluarga besar suami serta kelompok arisan keluarga dimanfaatkan untuk mendapatkan suara dari keluarga besar suami yang juga merupakan konstituennya di dapil Kota Kupang. Terkait dengan isu yang dibawa oleh Adoe Yuliana Elisabeth, ia fokus pada pemberdayaan masyarakat terutama perempuan, karena menurutnya perempuan harus didukung terutama

dalam penguatan ekonomi masyarakat. Pengalamannya sebagai aktivis dan pekerja sosial inilah yang disampaikannya pada masa kampanye sehingga masyarakat percaya dan yakin memilihnya menjadi wakil mereka di parlemen. Walaupun ia tidak melakukan kampanye secara besar-besaran seperti kampanye akbar di panggung, namun suara yang didapat dari masyarakat yang sebageaian besar adalah keluarga suami sudah cukup mengantarkannya sebagai anggota legislatif. Sampai dengan terpilihnya ia tetap konsisten, kembali ke dapil untuk membantu masyarakat dengan melakukan pemberdayaan perempuan (masyarakat), perbaikan jalan, edukasi kesehatan dan pendidikan serta pendampingan masyarakat terhadap permasalahannya yang dihadapi.

Kristien Samiyati

Pengalaman Kristien Samiyati masuk politik, dimulai pada tahun 2013 di Sumba Barat Daya (SBD) ketika Kristien Samiyati pulang kampung dan dilamar oleh pimpinan Partai Nasdem SBD dalam sebuah acara keluarga. Dengan latar belakang keluarga sebagai anak dari pimpinan Partai Golkar di Kabupaten Sumba Barat, Kristien Samiyati sudah sangat terbiasa dan suka berbicara tentang isu-isu politik di NTT terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Selain dilatarbelakangi dengan ayah sebagai pimpinan partai, Kristien Samiyati dengan profesinya sebagai guru saat itu sangat *concern* terhadap semua kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan dan perempuan.

Oleh karenanya, pada saat diminta untuk bergabung dengan Partai Nasdem, Kristien Samiyati memberikan respon yang positif walaupun ada keraguan tentang kemampuan finansial yang dimiliki.

“Memang waktu itu berbicara tentang Partai Nasdem yang ada di otak saya langsung Surya Paloh dan Bung Vicor Bungtilu Laiskodat, saya suka dengan figur mereka ini. Walaupun belum detail saya tahu tentang Partai Nasdem karena saat itu masih partai baru, tapi saya langsung bersimpatik dengan orang-orang yang ada. Dan ketika saya diajak untuk bergabung, bahkan saat itu sudah dalam masa rekrut caleg untuk pemilu 2014, memang awalnya saya sempat ragu, karena saya mempertimbangkan masalah biaya. Saya belum punya modal untuk terjun di politik, bahkan secara mental pun saya belum siap.”¹⁰

Walaupun secara mental dan finansial Kristien Samiyati belum siap, namun dalam hatinya ada keinginan yang besar untuk masuk dalam politik. Kristien Samiyati sebagai perempuan tidak mau hanya sebagai pelengkap, tetapi ingin berperan dan berkontribusi lebih besar bagi daerah asalnya.

“Saya merasa memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam ranah politik, dan saya memiliki orang tua yang merupakan orang asli dari SBD serta keluarga besar. Jadi tidak begitu sulit bagi saya untuk menyosialisasi diri, ditambah lagi Partai Nasdem berjanji akan mem-*back up* saya. Akhirnya saya menerima “lamaran” Partai Nasdem untuk masuk dalam kepengurusan Partai Nasdem dan mencalonkan saya sebagai salah satu calon anggota DPRD Provinsi NTT dari dapil Sumba. Saya langsung memberikan berkas dan sebagainya dan saya memang beruntung sekali ketika bergabung dengan Partai Nasdem karena partai ini betul-betul mendukung kadernya terutama kader perempuan.”

¹⁰ Wawancara dengan Kristien Samiyati Pati, anggota legislatif dari Partai Nadem DPRD Provinsi NTT 2014-2019, Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, di Restoran Bakso Cakmin, Kota Kupang.

Sebagai perempuan yang berasal dari Sumba, daerah yang dikenal dengan nilai patriarki yang kuat, Kristien Samiyati tidak menemukan hambatan budaya yang berat dari daerahnya. Masyarakat Sumba memberikan ruang kepada siapapun untuk masuk politik termasuk kepada perempuan, yang terpenting adalah mampu menempatkan diri sebagai perempuan Sumba yang menjunjung tinggi adat dan paham budaya.

Kristien Samiyati memiliki latar belakang profesi sebagai guru teknologi pertanian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Ruteng Kabupaten Manggarai, Flores. Kristien Samiyati merupakan lulusan dari teknologi pengolahan hasil pertanian Malang. Ia berprofesi sebagai guru yang bertujuan untuk melahirkan tamatan-tamatan SMK yang mandiri, siap kerja serta mampu mendirikan lapangan kerja buat dirinya sendiri bahkan buat orang lain. Selain sebagai guru, Kristien Samiyati memiliki usaha penyediaan hasil kebun berupa sayur-mayur, buah-buahan dan sering kali melibatkan murid didiknya untuk praktek di kebun usaha miliknya. Hal ini dikarenakan sekolah tempatnya mengajar tidak memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang baik, tidak ada listrik dan air.

“Waktu itu di sekolah tempat saya mengajar itu belum punya fasilitas, sarana prasarananya masih sangat jauh, tidak ada listrik, air. Tapi tidak menyurutkan semangat saya bagaimana anak-anak itu kita didik dan ketika mereka tamat dari sekolah, mereka bisa mandiri. Kita mulai dari hal-hal kecil sesuai dengan potensi lokal di sana, misalnya daerah tempat sekolah di sana penghasil sayur, contohnya sayur sawi hijau dan kita ajar anak-anak untuk bikin sayur asin, bagaimana penanganan pasca panen, mengajar mereka membuat tahu tempe. Di sana potensi singkongnya bagus, jadi saya ajarkan anak-anak untuk buat tape,

kerupuk. Bagi saya itu merupakan hal kecil, tapi kalau kita serius mengerjakannya bisa menjadi peluang yang besar dan ini yang harus kita lakukan untuk mengubah pola pikir anak-anak tentang masa depan.”

Latar belakang inilah yang membuat Kristien Samiyati tertarik untuk masuk dalam ranah politik, karena dengan masuk ke ranah politik sebagai wakil rakyat, ia bisa membawa perubahan terutama dibidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Bagi Kristien Samiyati, perempuan belum memiliki akses dan kesempatan dalam pendidikan dan pekerjaan, sehingga melalui politik dia dapat terlibat dalam pembuatan peraturan-peraturan dan kebijakan yang pro perempuan dan anak. Selain sebagai guru, Kristien Samiyati juga aktif dalam kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan menjadi pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Cabang Kota Ruteng Kabupaten Manggarai.

Pada pemilu 2014, Kristien Samiyati yang merupakan pendatang baru, tidak mempermasalahkan partai memberikan nomor urut besar. Kristien Samiyati optimis dan yakin mengikuti kontestasi pemilu karena dukungan dari keluarga terutama dari ayahnya. Walaupun sebagai caleg harus memiliki modal ekonomi yang kuat namun dalam hati kecilnya ia yakin bisa berhasil karena sudah mengenal siapa pemilihnya. Ia dapat berkomunikasi dengan baik karena pemilihnya adalah keluarga besar orang tua (ayahnya) sehingga ia tidak menemukan hambatan besar. Pada saat proses pengiriman calon, Partai Nasdem dari dapil NTT III Kabupaten Sumba memiliki kuota 10 kursi, sehingga tiap DPD di empat kabupaten di Sumba mengirim calonnya. Kristien Samiyati merupakan salah satu dari tiga perempuan yang dikirim oleh Partai Nasdem dari Kabupaten SBD.

Selanjutnya, Kristien Samiyati dalam kampanyenya menyampaikan pentingnya kesehatan ibu dan anak.

“Saat kampanye di Kabupaten Sumba, saya membawa isu kesehatan dengan lebih fokus pada ibu dan anak, saya ya karena dari pendidikan, mudah dalam pengaulan, dan senang berkomunikasi, ya saya memanfaatkan media dalam kampanye. Akhir-akhir ini saya juga memberikan pemahaman terpentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja perempuan, karena mereka ini yang menjadi modal kita sebenarnya. Ketika remaja putri tidak diberikan pemahaman ini, ya *dorang* (mereka) yang akan menjadi calon ibu bagi generasi kita.”

Walaupun tidak dalam masa kampanye pun, Kristien Samiyati juga berbicara mengenai pentingnya isu kesehatan ibu dan anak. Hal ini dilakukan di dalam pertemuan keluarga besar, persekutuan gereja, dan pertemuan tidak resmi lainnya. Selain masalah kesehatan, ia juga menyampaikan pentingnya masalah lingkungan serta tenaga kerja ilegal di Kabupaten Sumba. Salah satu kesempatan yang dilakukannya adalah dalam pertemuan persekutuan doa di lingkungan. Masyarakat berbicara mengenai masalah tenaga kerja ilegal asal Kabupaten Sumba yang didapat dari media massa, dan banyak kejadian ini terjadi di Malaysia. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Kristien Samiyati langsung menemui kepala desa yang juga masih keluarga besar untuk membahas masalah tenaga kerja ilegal. Pembahasan ini tidak dilakukan dalam forum resmi, melainkan dalam pembicaraan santai. Menurut Kristien Samiyati, masyarakat adalah tanggungjawab kepala desa, maka kepala desa berkewajiban untuk menjaga masyarakatnya. Kristien Samiyati memiliki no telepon kepala desa, kepala dusun dan RT di dapilnya agar ia dapat dengan cepat berkomunikasi untuk menanyakan

permasalahan atau ada tidaknya masyarakat di dapilnya yang bermasalah.

Berdasarkan paparan Kristien Samiyati di atas, faktor orang tua (ayah) dan keluarga besar serta lingkungan sosial sangat menentukan dan memengaruhi perilaku individu perempuan untuk terlibat dalam ranah politik termasuk berbagai kegiatan (melalui organisasi massa, sosial dan keagamaan). Dukungan utama dari ayah yang memberikan pemahaman akan pentingnya perempuan masuk dalam politik sangat meyakinkan Kristien Samiyati. Dukungan keluarga besar dan masyarakat dilandasi oleh nilai-nilai dan pemahaman akan pentingnya potensi perempuan.

Terkait dengan isu yang dibawa oleh Kristien Samiyati dalam kampanye, ia tidak hanya fokus pada isu kesehatan saja, tetapi juga berbicara dan mendengarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat di dapilnya. Semua masalah yang berhubungan dengan perempuan dan anak menjadi fokusnya, termasuk soal lingkungan (pemanfaatan budidaya tebu yang potensial di Kabupaten Sumba Timur), tenaga kerja ilegal, serta pendidikan. Ini semua dilakukannya sebagai bentuk perhatian dan kepedulian sebagai seorang perempuan dan ibu. Aktivitasnya memang tidak dilakukan secara resmi atau formal namun dengan turun ke lapangan, pasar, gereja, melakukan kunjungan ke masyarakat yang memilihnya. Ini merupakan modal utama kepercayaan masyarakat kepada Kristien Samiyati.

Ana Waha Kolin

Ana Waha Kolin pertama kali masuk partai politik pada tahun 2003 dan partai politik yang ia pilih adalah PKB. Alasan ia masuk PKB karena sosok Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang pluralis. Apalagi di NTT meski mayoritas masyarakatnya beragama Katolik dan Protestan, namun

sangat menghargai agama minoritas lain, dan menurutnya pemikiran ini ada pada sosok Gusdur.

“Jadi saya sejak 2003 mulai bergabung ke dunia politik, waktu itu pilihan saya ke PKB karena saya melihat sosok Gusdur yang sangat pluralis. Di Indonesia kita menyebutnya bapak bangsa dan saya kira PKB sangat tepat untuk saya bergabung. Mengapa saya bergabung? karena bicara tentang NTT kalau soal agama mayoritas kita kan katolik dan kristen tapi itu kan *scope* NTT tapi kalo kita tarik *scope* ke Indonesia kita (NTT) ini menjadi kaum minoritas. Dan yang mengayomi dan melindungi minoritas (kita) adalah Gusdur, sosok ini yang membuat saya bergabung di PKB, selain visi dan misi PKB itu sendiri.”¹¹

Selain sosok Gusdur, Ana Waha Kolin sudah tersosialisasikan tentang politik sejak dari dalam rumah. Ayahnya yang merupakan pejabat publik, selama 20 tahun menjadi kepala desa dan sebagai lurah selama 10 tahun. Artinya, perihal kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat sudah sejak lama ia pelajari dan alami melalui peran ayahnya. Jadi yang mendorong ia masuk dalam politik adalah gambaran pengalaman dari ayahnya sehingga jiwa kepemimpinan itu tumbuh dalam dirinya.

Pada tahun 2004 dan 2009 Ana Waha Kolin mengikuti pemilu namun tidak terpilih di dapil tempat orang tuanya berasal yaitu di Flores Timur. Ia sadar dan tidak memaksakan diri untuk menang, tetapi melakukan investasi politik sembari belajar politik praktis di partai politik. Selama tahun 2004 sampai dengan 2009, ia masih aktif berkerja sebagai aktivis perempuan dan konsultan perbankan. Salah satu

¹¹ Wawancara dengan Ana Waha Kolin, perempuan caleg dari PKB, Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta Pusat.

aktivitas yang ia lakukan adalah mengedukasi tentang kekerasan terhadap perempuan (terutama perempuan NTT) di Kota Kupang.

Pada pemilu 2014 ia ikut lagi menjadi caleg namun dengan dapil yang berbeda yaitu di Kota Kupang. Ia memilih dapil Kota Kupang karena telah bertahun-tahun bekerja di sana, sehingga ia yakin dapat meraih suara dan menurutnya masyarakat di Kota Kupang adalah pemilih rasional. Sayangnya ia masih belum beruntung. Perolehan suaranya di Kota Kupang justru tidak baik, dari hasil evaluasinya pemilih di Kota Kupang masih merupakan pemilih tradisional, ditambah lagi ia tidak memiliki modal ekonomi. Ia lebih menekankan pada modal sosial sementara caleg lain memiliki modal ekonomi yang kuat..

“Jadi tahun 2013 pas pencalegan untuk pemilu 2014, ketua partai bertanya tentang dapil pilihan saya dan saya bilang saya memilih Kota Kupang. Terus ketua partai bilang kenapa bukan Flores Timur?.. saya jawab tidak karena saya merasa bahwa kerja-kerja kemanusiaan yang saya lakukan kurang lebih empat tahun lebih harus menjadi investasi politik saya di 2014. Saya sangat percaya diri tetapi memang benar-benar bahwa pemikiran saya pemilih di Kota Kupang saya pikir pemilihnya rasional ternyata sangat tradisional. Mereka tidak sedang memilih apa melihat secara langsung orang ini harus pintar atau tidak. Saya tidak terpilih karena saya memang tidak punya modal dan tidak punya uang. Karena modal sosial saya mengadvokasikan basis dikalahkan oleh siapa yang datang ke rumah yang mengetuk pintu ketika besok pemilu.”

Walaupun tantangan modal ekonomi ini, Ana Waha Kolin tidak mundur, ia tetap berprinsip bahwa dalam politik dan menjadi politisi harus kuat dada, nafas panjang dan totalitas. Inilah yang ia lakukan sampai dengan pemilu 2019

yang lalu, ia memilih dapil Flores Timur tempat orang tuanya berasal. Keluarga besar orang tua siap mendukungnya, maka dibentuklah tim keluarga, alumni, teman-teman LSM sebagai tim suksesnya.

“Secara psikologis saya harus ke dapil saya dulu. Saya tidak menang karena saya menjadi *single fighter* di dapil sebelumnya, tetapi saya yakin kali ini saya harus menang punya keyakinan kembali ke dapil orang tua. Mereka semua sudah pensiun dan siap membantu saya, maka dibentuklah tim keluarga dan alumni untuk bisa menjadi *counter path* saya di lapangan dan mensukseskan saya pada pemilu 2019 dan saya juga berjejaring dengan teman-teman organisasi, LSM. Kami berkonsultasi bersama itu menjadi modal kuat untuk mensukseskan saya di pemilu 2019.”

Di dapil orang tua ini, Ana Waha Kolin juga menghadapi tantangan finansial, namun ia bersyukur karena dukungan keluarga ini dapat memenangkannya sebagai anggota legislatif. Sebagai orang asli Flores Timur, Ana Waha Kolin mendapatkan restu dari tetua adat melalui ritual adat yang ia dan keluarga lakukan sebagai permohonan agar jalannya dalam pemilu 2019 ini lancar dan tanpa rintangan.

“Jujur...saya tidak punya uang... kan orang bilang uang bukan segala-galanya tetapi segala-galanya butuh uang termasuk beli aqua pakai uang. Bagi saya semangat dorongan keluarga itu vitamin luar biasa untuk mendorong saya dalam dunia politik. Faktor lain yang bener-bener saya rasakan bahwa saya bisa menang adalah saya sangat menghargai budaya jadi sebelum saya keluar kampanye di luar kelurahan, saya melakukan ritual adat. Ritual adat ini semacam minta pamit kepada leluhur di rumah adat untuk saya pamit mau keluar sehingga jalan saya tidak tersangkut dan saya tidak akan jatuh. Ini saya

lihat sendiri, suara saya tidak hilang mulai dari TPS di desa sampai ke KPU.”

Selanjutnya terkait dengan jaringan yang dimiliki oleh Ana Waha Kolin. Di Flores Timur ia memiliki jaringan kuat dari keluarga, sedangkan di Kabupaten Lembata dan Kabupaten Alor ia berkomunikasi dengan jaringan-jaringan seperti keluarga besar, pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) dan teman-teman LSM yang sama-sama melakukan advokasi saat ia masih di Kota Kupang. Selain itu, ia juga memanfaatkan latar belakang keluarga (saudara kandung) yang merupakan pensiunan PNS di dua kabupaten lain. Ia dan tim sukses (saudara kandung) mendatangi tokoh masyarakat untuk sosialisasi dan memilih Ana Waha Kolin sebagai anggota legislatif.

Berdasarkan paparan Ana Waha Kolin ini, faktor orang tua (ayah) dan keluarga besar sangat menentukan dan memengaruhinya masuk dalam politik termasuk berbagai kegiatan (melalui organisasi massa, sosial dan keagamaan). Sosialisasi politik yang ia alami ini menjadikan modal utama untuk masuk dan terlibat dalam politik praktis dengan memilih PKB sebagai partai naungannya. Ia terpilih menjadi anggota legislatif karena kepercayaan masyarakat terhadapnya melalui jaringan keluarga besar yang merupakan pensiunan PNS dan nama besar ayah yang adalah pejabat publik. Selain itu, peran besar dari alumni dan teman-teman di LSM dan WKRI yang merupakan komunitasnya memberikan jalan mulus untuk meraih suara di dapilnya. Ia memanfaatkan perannya sebagai pekerja di LSM yang telah banyak mengadvokasi masyarakat di berbagai daerah di NTT serta posisinya sebagai pengurus di WKRI. Ana Waha Kolin juga merupakan politisi senior di PKB sekaligus ketua kaukus parlemen NTT yang tentunya

menjadikannya sangat populer dan disegani di komunitas politisi di NTT.

Inche D.P. Sayuna

Inche D.P. Sayuna tertarik pada politik sejak usia 17 tahun dan ini berangkat dari kesadarannya untuk menjadi pemimpin. Sebelumnya ia aktif berorganisasi sejak SMA dan berlanjut di perguruan tinggi. Ia sadar untuk menjadi pemimpin tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan formal, oleh sebab itu ia masuk dalam organisasi pemuda di Partai Golkar. Disinilah ia banyak belajar tentang politik dan memutuskan menjadi kader partai.

“Saya berorganisasi dari SMA dan terus berlanjut di perguruan tinggi saat saya kuliah di Kota Kupang. Saya ingin menjadi pemimpin dan saya sadar ini tidak bisa saya dapatkan di pendidikan formal, oleh sebab itu saya memilih aktif di organisasi. Saat itu, ada teman angkatan saya yang sudah aktif di partai, namun saya belum memutuskan untuk masuk partai, saya hanya ingin belajar politik saya masuk organisasi pemuda dari Partai Golkar, yang saya tahu ini merupakan wadah berhimpun orang-orang muda yang ingin menjadi kader Partai Golkar.”¹²

Dengan masuknya Inche D.P Sayuna di organisasi pemuda Partai Golkar ini, memberinya wawasan bahwa untuk menjadi politisi ia harus memiliki modal sosial dan modal kapital yang cukup. Memang untuk politisi perempuan dari banyak pengalaman sebelumnya, modal kapital atau modal ekonomi ini menjadi tantangan untuk

¹² Wawancara dengan Inche D.P. Sayuna, perempuan caleg dari Partai Golkar, Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

bersaing dengan kader atau politisi lain guna mendapatkan suara konstituen. Inche D.P. Sayuna menyadari tantangan ini, namun demikian ia memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya di mana ia aktif sebagai anggota majelis sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang merupakan gereja terbesar di NTT dan memiliki jemaat setengah penduduk NTT.

“Kenapa saya bisa terpilih?... menurut saya untuk menjadi seorang politisi saya harus punya modal sosial, modal kapital yang cukup. Selain aktif di organisasi, saya juga aktif berbagai organisasi di gereja misalnya saya menjadi anggota majelis sinode GMIT. Yah GMIT ini sebuah gereja terbesar di NTT anggota majelis GMIT Sinode GMIT. Sebagai anggota majelis GMIT tentu saya banyak turun ke jemaat ya dan memperkenalkan diri ke jemaat, berbicara pelayanan dalam gereja dengan jemaat. Oleh karena itu banyak jemaat yang memahami dan mengenal saya sebagai tokoh gereja, tokoh aktivis dan saya juga dosen yang mempunyai banyak mahasiswa yang dari kabupaten Timor Tengah Selatan.”

Selain aktif di organisasi partai dan gereja, Inche D.P. Sayuna berprofesi sebagai dosen (tenaga pendidik) di Fakultas Hukum, ini merupakan modal sosial dan nilai tambah yang ia miliki. Dengan profesinya sebagai dosen, ia mempunyai banyak mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang merupakan dapilnya. Mahasiswa dan keluarga mahasiswa ini ada yang merupakan konstituennya, karena mereka sudah mengenal sosoknya sebagai dosen dan aktivis di kampus dan di Kota Kupang.

“Saya aktif di organisasi gereja dan gereja GMIT ini anggota majelis Timor dan gereja GMIT Sinode punya

umat terbesar di NTT. Kedua saya aktif sebagai dosen Fakultas Hukum dan ini fakultas idola dari mahasiswa di kampus saya dan paling banyak mahasiswa berasal dari Timor Tengah Selatan begitu dan ini modal sosial dan saya tidak pernah berpikir sewaktu-waktu saya akan jadi anggota DPR dalam usia waktu itu usia yang paling muda masuk DPRD, saya baru umur 31 tahun kalau tidak salah waktu itu peralihan dari Orde Baru ke Reformasi. Nah Partai Golkar ini kan identik dengan partai orang tua, jadi saya termasuk orang muda pertama yang didorong oleh partai Golkar untuk masuk dalam kompetisi legislatif.”

Partai Golkar melihat popularitas dan keaktifan Inche D.P. Sayuna di organisasi dan kegiatannya dalam mengadvokasi masyarakat, oleh karenanya Partai Golkar memintanya menjadi kader dan akan dicalonkan sebagai perempuan caleg. Partai Golkar melihat potensi yang ada pada Inche D.P. Sayuna, dan ini terbukti dengan terpilihnya menjadi anggota DPRD Provinsi NTT pada pemilu 1999. Inche D.P. Sayuna memang berasal dari keluarga terpandang di Kabupaten TTS, ini merupakan modal sosial yang dimilikinya dengan keluarga besar dan profesinya sebagai dosen serta aktivis. Selain itu, kemampuan komunikasinya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa perempuan memiliki kelebihan dalam menyakinkan dan membantu masyarakat di daerahnya. Ini dilakukan dengan membantu masyarakat dalam bidang kesehatan salah satunya dengan memberikan bantuan mobil kesehatan (ambulance).

Selanjutnya terkait dengan jaringan yang dimiliki oleh Inche D.P. Sayuna. Di TTS ia memiliki jaringan kuat dari keluarga, jemaat gereja (GMIT), mahasiswa, dan organisasi hukum karena latar belakangnya sebagai dosen Fakultas Hukum. Selain itu, ia merupakan tokoh senior di Partai Golkar sekaligus pengurus DPD Partai Golkar Provinsi NTT,

ini yang menjadi kekuatannya. Ia juga pernah menjadi calon dalam pilkada di Kab TTS, walaupun saat itu tidak menang, namun ia memiliki konstituen setia. Ini berdampak pada pemilu 2019 yang lalu, di mana konstituen dan masyarakat memilih ia sebagai anggota legislatif. Ada strategi yang dilakukan oleh Inche D.P. Sayuna, selama kampanye pada pemilu 2019, ia hanya fokus pada basis dengan konstituen terbanyak yaitu tiga kecamatan, di mana masyarakat sudah mengenal dekat dengannya. Ini dikarenakan ia telah berkali-kali mengikuti pemilu dan pilkada. Jadi disinilah terdapat basis-basis fanatiknya dan ini yang memenangkannya menjadi anggota legislatif.

Inche D.P. Sayuna memahami benar bahwa masyarakat yang memilihnya adalah modal sosial yang harus dijaga suaranya. Oleh karenanya, selama menjadi anggota legislatif ia kembali ke dapil dan memberikan bantuan secara konsisten, sehingga masyarakat menjadi konstituen setianya setiap pemilu. Ia pun memfasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan. Sebagai contoh kelompok menenun, ia membantu dengan memberikan modal dan setelah itu membeli hasil tenunan mereka. Ia juga adalah ketua Ikatan Wanita Pengusaha NTT (IWAPI NTT) yang dengan akses ini dapat memasarkan karya tenun ke berbagai daerah bahkan ke luar negeri. Selain itu, ia juga fokus pada infrastruktur seperti perbaikan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, koperasi, bahkan menyediakan mobil ambulance dan mobil jenazah untuk masyarakat TTS.

Bab 4

Strategi Kemenangan Perempuan Caleg dalam Pemilu 2019 di DPRD Provinsi NTT

4.1 Pemanfaatan Modal Sosial dan *Moral Capital*

Berdasarkan pengalaman empat perempuan caleg, motivasi dan latar belakang mereka masuk politik dipengaruhi oleh tiga hal yaitu:

Pertama, kemampuan individu. Kemampuan individu yang dimiliki oleh empat perempuan ini merupakan modal utama masuk dalam politik elektoral. Kemampuan individu yang dimiliki antara lain kepribadian dan komunikasi publik yang baik serta kepemimpinan. Kepribadian yang dimiliki ini tercermin dari profesi mereka sebagai aktivis, guru dan advokat yang secara langsung memengaruhi komunikasi publik mereka ke pemilih masing-masing. Selain itu, kepemimpinan mereka dalam organisasi sebelum masuk dalam politik juga menjadi kunci.

Kedua, nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Seperti yang disampaikan oleh Dewi (2020), tentang karakter perempuan dalam pembuatan kebijakan. Perempuan cenderung menitikberatkan pada isu-isu spesifik yang berkaitan dengan perempuan, anak, kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan isu lainnya yang berkaitan dengan sifat “caring” dari perempuan.

Ketiga, dukungan suami, orang tua (ayah), keluarga besar dan masyarakat. Empat perempuan caleg ini berhasil menjadi anggota legislatif karena dukungan budaya patriarki (laki-laki) suami dan ayah yang memiliki nama besar dan pengaruh di dalam masyarakat.

Selanjutnya berhubungan dengan awal karir politik empat perempuan ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Adoe Yuliana Elisabeth, Kristien Samiyati, Ana Waha Kolin dan Inche D.P. Sayuna memiliki kemampuan individu sehingga mereka yakin masuk dalam partai politik dan dapat memperjuangkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan sebagai pembuat kebijakan. Dengan latar belakang profesi empat perempuan ini, masyarakat (konstituen) percaya dan yakin bahwa walaupun mereka perempuan, mereka akan memperjuangkan hak dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Disamping itu, dukungan orang terdekat (suami, ayah, keluarga besar) merupakan modal utama dan kunci keberhasilan empat perempuan menjadi anggota legislatif.

Putnam menunjukkan bahwa modal sosial melekat dalam relasi-relasi sosial. Modal sosial dibangun melalui jejaring sosial yang mencakup: 1) *trust* (kepercayaan) atau nilai-nilai positif yang menghargai perkembangan atau prestasi; 2) norma sosial dan obligasi; 3) jejaring sosial yang menjadi wadah kegiatan sosial, terutama dalam bentuk asosiasi-asosiasi sukarela (*voluntary associations*). Putnam percaya bahwa asosiasi sukarela memiliki peran penting dalam upaya mengembangkan modal sosial, selain efektif menyalurkan informasi (*flow of information*), juga menjadi ajang berinteraksi dan melakukan transaksi di antara aktor-aktor di dalamnya. Interaksi dan transaksi tersebut yang selanjutnya mendorong mereka mengembangkan norma-norma yang memfasilitasi kerja sama saling menguntungkan (*reciprocal relationship*).

Modal sosial akan semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling balas bantu dan kerja sama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan akar budaya, terutama berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku.

Kepercayaan antara perempuan caleg dengan konstituen berasal dari suami, orang tua (ayah), keluarga, gereja dan sahabat. Kepercayaan yang timbul dari masyarakat/konstituen adalah timbal balik dari nilai yang sama-sama dianut atau berdasarkan pada kesamaan suku dan organisasi. Kepercayaan sebagai modal sosial berdasarkan pada figur perempuan caleg. Seperti Adoe Yuliana Elisabeth yang merupakan pekerja sosial dan juga istri dari suami terpandang dan keluarga besar dengan komunitas besar di Kota Kupang. Kristien Samiyati seorang guru dan anak dari pengurus partai dan tokoh masyarakat di Kabupaten SBD. Ana Waha Kolin aktivis sosial dan aktif dalam kegiatan politik dan juga merupakan anak dari orang tua (ayah) masyarakat dan putra daerah di Kabupaten Flores Timur. Inche D.P. Sayuna sebagai dosen, advokat dan anggota majelis gereja terbesar di NTT serta anak dari keluarga terhormat di Kabupaten TTS.

Pemanfaatan modal sosial dan *moral capital* yang dimiliki oleh empat perempuan caleg ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Pemanfaatan Modal Sosial dan *Moral Capital*
Empat Perempuan Caleg pada Pemilu 2019
di DPRD Provinsi NTT

No	Nama	Modal Sosial	<i>Moral Capital</i>
1	Adoe Yuliana Elisabeth	<ul style="list-style-type: none"> - Suami (orang terpandang) - Keluarga besar suami - Kelompok arisan keluarga daerah asal suami 	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerja sosial (aktivis) - GMNI - Advokasi masyarakat

2	Kristien Samiyati	<ul style="list-style-type: none"> - Orang tua (ayah politisi) - Keluarga besar orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> - Guru - Anggota PKK - WKRI
3	Ana Waha Kolin	<ul style="list-style-type: none"> - Orang tua (ayah orang terpandang) - Keluarga besar orang tua - Alumni - Sesama aktivis 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivis - Pemberdayaan masyarakat - Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen - WKRI
4	Inche D.P. Sayuna	<ul style="list-style-type: none"> - Jemaat gereja - Mahasiswa asal dapil yang sama - Keluarga terhormat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen - Advokat - Majelis GMT - IWAPI

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari sini terlihat bahwa kepercayaan/*trust* empat perempuan dan masyarakat dibangun atas dasar lingkaran yang paling dalam yaitu keluarga, dan dengan lingkaran luar berupa persahabatan atas dasar pengetahuan (*knowledge-based trust*). Proses kenal bersifat personal, sehingga kepercayaan yang muncul bersifat personal. Kepercayaan yang timbul bersifat hubungan timbal balik karena adanya nilai-nilai yang sama sebagai sesama anggota keluarga, kesamaan suku, organisasi dan jemaat gereja.

Sebagai anggota keluarga (keluarga besar), empat perempuan ini memiliki keuntungan karena pembicaraan mengenai program dan isu dapat dilakukan secara informal kecuali dalam masyarakat adat yang memang harus melalui proses atau ritual adat yang berlaku di masing-masing daerah. Kristien Samiyati misalnya, sebagai perempuan Sumba, mereka harus melalui ritual bersama tokoh adat

dalam proses pencalonan mereka sebagai caleg. Demikian juga Adoe Yuliana Elisabeth, Ana Waha Kolin dan Inche D.P. Sayuna, dalam adat masyarakat Flores dan Timor, mereka harus masuk dalam ritual dengan mempersiapkan tata laksana adat mulai dari awal sampai akhir. Pada penelitian sebelumnya tahun 2018, peneliti pernah mengikuti salah satu perempuan caleg di Kabupaten Manggarai Barat, ia meminta restu leluhur menjelang pemilu 2019, di mana prosesi tersebut dilakukan di rumah adat (rumah gendang). Terdapat dua tradisi ritual adat yang harus dilakukan yaitu tradisi *teing hang* (memberikan sesajian kepada arwah leluhur di rumah adat gendang) dan tradisi *wuat wai* (pembekalan yang diberikan oleh tetua adat). Ritual ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur secara turun temurun, dengan mediator digunakan ayam putih sebagai simbol ketulusan hati dalam memperjuangkan dan melayani masyarakat.

Dalam masyarakat NTT secara keseluruhan, hal ini harus dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur (nenek moyang), bagi perempuan caleg adat istiadat ini wajib terus dipertahankan walaupun bukan sebagai penentu kemenangan. Di masyarakat Timor, tradisi ini merupakan warisan leluhur sebagai kepercayaan tua, dan sebagai masyarakat adat, harus menghargai ritual ini agar hidup selamat dan berjalan lancar.

Kepercayaan yang ada antara empat perempuan ini dengan masyarakat dibangun dari interaksi yang intens, yaitu sejak empat perempuan ini berkarir dalam organisasi-organisasi sosial, masyarakat dan keagamaan. Dengan demikian kepercayaan sebagai modal sosial didapat dari figur empat perempuan ini karena ketokohan/kepopuleran mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepercayaan ini terbangun atas dasar kekeluargaan, kesukuan, hubungan sosial masyarakat dan keagamaan. Dengan demikian,

hubungan ini memudahkan empat perempuan dalam proses kampanye politik di lapangan. Masyarakat yang merupakan anggota keluarga besar memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada empat perempuan, karena mereka yakin empat perempuan ini akan memperjuangkan aspirasi keluarga/masyarakat dan menepati janji jika terpilih menjadi anggota legislatif.

Coleman dan Putnam adalah dua orang yang mendefinisikan kepercayaan sebagai satu komponen utama modal sosial. Francis Fukuyama mendefinisikan kepercayaan itu sendiri sebagai unsur dasar modal sosial. Modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan abadi di tengah-tengah masyarakat atau pada bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Namun Fukuyama sendiri mengklaim bahwa kepercayaan adalah dasar dari tatanan sosial: komunitas tergantung pada kepercayaan timbal balik dan tidak muncul secara spontan tanpanya (Field, 2011).

“Trust is the expectation that arise within community of regular, honest and cooperative behavior, based on commonly shared norms, on the part of other members of that community.... social capital is capability that arise from the prevalence of trust in a society or in certain parts of it. it can be embodied in the smallest and most basic social group, the family , as well as the largests of all groups, the nation and all the other group in between (Fukuyama, 1995).

Kepercayaan adalah harapan yang muncul dalam komunitas perilaku reguler, jujur dan kooperatif, berdasarkan norma bersama, dari anggota masyarakat lainnya. Modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari prevalensi kepercayaan pada masyarakat atau di bagian-

bagian tertentu. Hal itu dapat diwujudkan dalam kelompok sosial terkecil dan paling dasar, keluarga, dan juga kelompok terbesar, semua bangsa, dan semua kelompok lainnya di antaranya.

Fukuyama bahkan menjadikan kepercayaan sebagai unsur dasar modal sosial dan dasar dari tatanan sosial. Tanpa kepercayaan, transaksi sosial dan ekonomi menjadi sangat mahal dan birokratis. Ini sangat relevan dengan konsep modal sosial yang menitikberatkan pada cara jaringan memberikan akses pada sumber daya (Field, 2011).

Sekali lagi kepercayaan dari masyarakat ini timbul karena harapan akan diwakilinya kepentingan mereka oleh empat perempuan ini, di mana empat perempuan ini akan melakukan tugasnya sebagai pembawa aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat. Selanjutnya, setelah terpilih menjadi anggota legislatif maka mereka akan melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Hal ini yang menjadi harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap empat perempuan ini.

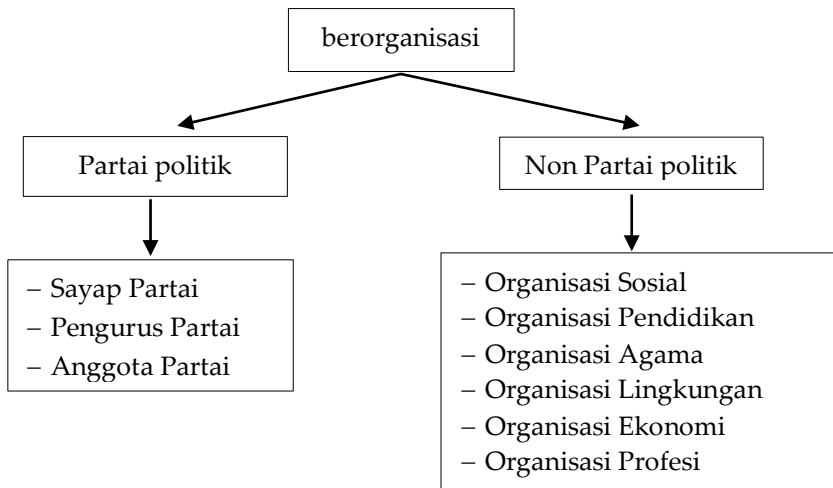
Menurut Putnam, modal sosial merupakan barang publik, di mana kepercayaan adalah atribut dari struktur sosial yang tertanam dalam diri individu. Tetapi terdapat juga ketidakpercayaan yang terjadi karena pengalaman yang buruk atau rekam jejak yang buruk dari seorang legislator, di mana jabatan yang diperoleh kemudian tidak memberikan dampak yang signifikan bagi para masyarakat (konstituen) di dapilnya. Oleh karena itu, kepercayaan dalam modal sosial harus benar-benar dijaga dengan cara membangun hubungan berkelanjutan dan memberikan efek positif bagi masyarakat.

“One special feature of social capital like trust, norms and networks, is that it is ordinarily a public good. Like all public goods, social capital tends to be undervalued and

undersupplied by private agents. This means that social capital, unlike other forms of capital, must often be produced as a by-product of other social activities (Putnam, 1993).

Selain itu, kepercayaan yang dibangun oleh empat perempuan ini bersumber dari kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, keagamaan yang dilakukan di dalam masyarakat dan secara terus menerus.

Selain pengetahuan dan pendidikan, pengalaman organisasi dan pengalaman bekerja menjadi modal penting bagi perempuan caleg untuk terpilih dalam pemilu. Berdasarkan hasil penelitian, empat perempuan caleg ini memiliki beragam pengalaman berorganisasi. Sebagian besar adalah aktivis organisasi sosial dan organisasi politik serta menduduki jabatan sebagai pengurus organisasi. Hal ini merupakan bekal dan kemampuan kepemimpinan serta keterampilan politik baik yang dimiliki. Gambaran pengalaman organisasi empat perempuan caleg dapat dilihat pada bagan ini.



Bagan 4.1 Pengalaman Empat Perempuan Caleg dalam Pemilu 2019 di DPRD Provinsi NTT

Empat perempuan caleg ini telah memiliki pengalaman kepemimpinan sebelum terpilih. Adapun organisasi asal mereka antara lain di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), lembaga pemberdayaan perempuan, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Wanita Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).

4.2 Kemenangan Perempuan Caleg

Ruang lingkup analisa modal sosial terdapat pada individu empat perempuan caleg, yang berasal dari kelompok sosial paling kecil yaitu keluarga dan organisasi

masyarakat. Modal sosial ini tergambar dari aktivitas yang dilakukan oleh perempuan caleg yang melibatkan organisasi sosial, di mana terbentuk ikatan pribadi yang kuat berdasarkan pada kekeluargaan dan kekerabatan.

Selain itu, modal sosial empat perempuan ini juga terbentuk dari keluarga besar laki-laki (suami dan ayah) karena memang NTT memiliki budaya patriarki yang kuat, dengan ini maka hubungan terbentuk secara terus menerus dan mengikat empat perempuan. Inilah yang menimbulkan kepercayaan dari masyarakat (konstituen) karena kesamaan nilai yaitu: suku, agama dan norma di masyarakat.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, masing-masing perempuan caleg ini terpilih sebagai anggota legislatif karena telah memiliki modal sosial. Kristien Samiyati caleg petahana ini memiliki modal sosial berupa jaringan yang telah dibangun jauh sebelumnya. Demikian juga dengan Inche D.P Sayuna yang sebelumnya telah menjadi anggota DPRD Provinsi NTT dan juga pernah sebagai calon bupati di kabupatennya. Adoe Yuliana Elisabeth dan Ana Waha Kolin yang merupakan aktivis serta pekerja sosial juga telah memiliki modal sosial berupa jaringan dari masyarakat yang didampinginya di dapil maupun di berbagai daerah di NTT.

Keempat perempuan ini selain memiliki jaringan, mereka memiliki kepercayaan yang timbul karena memiliki nilai-nilai yang sama berdasarkan pada kesamaan suku (suku Manggarai/Flores, suku Sumba, suku Larantuka/Lembata, dan suku Timor). Adoe Yuliana Elisabeth memanfaatkan suku suami melalui arisan keluarga besar Manggarai di Kota Kupang; Kristien Samiyati memanfaatkan keluarga besar ayah di Sumba Barat Daya; Ana Waha Kolin memanfaatkan keluarga besar ayah di Larantuka/Lembata dan Inche D.P. Sayuna memanfaatkan keluarga besar suami dan ayah di Timor Tengah Selatan.

Selain itu, kesamaan organisasi melalui organisasi keagamaan (GMIT, WKRI), organisasi sosial (LSM), organisasi pendidikan (sekolah, ikatan alumni), organisasi politik (sayap partai, GMNI), organisasi profesi (IWAPI) dan organisasi lainnya. Juga kedekatan dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat di dapil masing-masing, ini berangkat dari status orang tua dan suami yang merupakan orang terhormat di daerah asal.

Selain modal sosial, *moral capital* juga menjadi kunci kemenangan empat perempuan, dengan profesi mereka sebagai guru/dosen, advokat dan aktivis. Profesi-profesi ini bagi masyarakat NTT merupakan profesi yang membanggakan dan panutan karena profesi ini dekat dengan masyarakat dan banyak membantu masyarakat. Empat perempuan caleg ini membuktikannya bukan saja dalam kampanye, namun setelah mereka terpilih, mereka kembali ke dapil mendengarkan dan memberi bantuan kepada masyarakat. Ini yang dipupuk oleh empat perempuan caleg sebagai modal mereka untuk maju pada pemilu berikutnya.

Selanjutnya implikasi teori modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam ini bahwa jaringan, norma dan kepercayaan saling berkaitan terhadap proses politik. Ini dimulai dari adanya ikatan pribadi perempuan caleg di tengah masyarakat, ikatan ini tentu saja dilandasi oleh berbagai norma dan kepercayaan melalui keluarga besar, tokoh masyarakat, dan organisasi. Modal sosial ini juga memengaruhi proses politik dengan adanya kepercayaan dan hubungan sosial yang terbentuk antara perempuan caleg dan masyarakat.

Untuk itu bagi caleg, harus lebih dahulu mendapatkan kepercayaan melalui jaringan, dan bagi perempuan caleg cukup sulit untuk mendapatkan kepercayaan ini, oleh sebab itu diperlukan waktu dan modal finansial yang tidak sedikit. Namun demikian, dengan adanya

jaringan, dapat memudahkan perempuan caleg dalam melakukan kegiatan politik (mulai dari sosialisasi diri, sampai dengan sosialisasi visi, misi).

Jaringan ini dapat berupa keluarga (suami, orang tua), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi sosial, organisasi agama, organisasi profesi, organisasi pendidikan, dan lain-lain. Dan modal sosial ini menjadi kekuatan bagi perempuan caleg untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. F., Betaubun, W. L., & Jalal, N. (2021). Quo vadis of parliamentary threshold in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1-17. doi:10.14710/jiip.v6i1.8618.
- Al-Amin, M., & Juniati, D. (2017). The analysis of fractal box-counting of face image by Canny edge detection-based human group age classification. *Jurnal Ilmiah Matematika*, 2(6), 33-42.
- Aribowo, A., Sucherly, S., Suryana, Y., & Effendi, N. (2016). A study of vote decision among political parties in legislative election 2014. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 4(5), 617-639. Diambil kembali dari <https://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2016/05/4541.pdf>.
- Bastian, A. F. (2010, May 11). *Political Marketing*. Dipetik November 2021, 30, dari <https://news.detik.com/opini/d-1355495/marketing-politik>.
- Bibi, H. (2020). Causes of low turn out of women in the general elections: A case study of district Peshawar. *Pakistan Social Sciences Review*, 4(2), 608-618. doi:10.35484/pssr.2020(4-II)48.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. (1992). *An Invitation of Reflexive Sociology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Budiarti, A. P. (2011). Sistem Kuota dan Zipper System: Perempuan dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Afirmasi*, Vol 01.

- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan* (A. Lazuardi, Trans). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahl, R. (1985). *Analisa Politik Modern*. Jakarta: Budi Aksara.
- Dalupe, B. (2020). Kandidat Perempuan dan Tantangan Politik Patronase pada Pemilu Legislatif 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Inada:Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar*, 3 (1), 15-34.
- Damarjati, D. (2019, April 13). *Abstain from the old order to present order*. Dipetik December 20, 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-4509398/fenomena-golput-dari-orde-lama-hingga-kekinian>
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dassonneville, R., Nugent, M. K., Hooghe, M., & Lau, R. (2020). Do women vote less correctly? The effect of gender on Ideological proximity voting and correct voting. *The Journal of Politics*, 82(3), 1156–1160. doi:10.1086/707525.
- Derichs, ,, Fleschenberg, A., & Hustebeck, M. (2006). Gendering Moral Capital: Morality as a Political Asset and Strategy of Top Female Politicians in Asia. *Critical Asian Studies*, 38 (3), 245-270.
- Dewi, K. H. (2017). Piety and Sexuality in a Public Sphere: Experiences of Javanese Muslim Women's Political

- Leadership. *Asian Journal of Women's Studies*, 23 (3), 340-362.
- Dewi, K. H. (2019). Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi Lokal: Perspektif Gender. Dalam S. H. (Ed), *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi* (hal. 201-222). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur. (2003). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Dinas P dan K NTT.
- Fowler, E. F., Ridout, T. N., & Franz, M. M. (2016). Political advertising in 2016: The presidential election as outlier? *The Forum*, 14(4), 445-469. doi:10.1515/for-2016-0040.
- Hartono, J. (2012). *Business Research Methodology: Misunderstanding and Experiences*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Hassan, M. S., Mohideen, R. S.; Siti, A.A., Allam, S.N.S.,Mustaffa, F., & Ridzuan, A. R. (2021). The voting decision: Social media use, internal and external efficacy aspects. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(7), 1525-1535. doi:10.6007/IJARBS/v11-i7/10362.
- Intyaswati, D., Maryani, E., Sugiana, D., & Venus, A. (2021). Using media for voting decisions among first-time college students in West Java, Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(1), 327-339. doi:10.36941/ajis-2021-0028.
- Iyer, S., Kitson, M., & Toh, B. (2005). Social Capital, Economic Growth and Regional Development. *Regional Studies*, Vol 38 (8), 1015-1040.

- Jelita, I. N. (2019, May 30). *Indonesian General Election Committee: The involvement rate in 2019 exceeds the national target*. Dipetik December 20, 2021, dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/238702/kpu-partisipasi-pemilu-2019-lampaui-target-nasional>.
- Jovani, A. (2018). Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD Provinsi NTT pada Pemilu 2014. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar*, 1 (1), 75-93.
- Jovani, A; Subono, N.I & Suyanto, I. (2020). Women in the Parliament and Their Role in Formulating Gender Responsive Policies in East Nusa Tenggara. *Journal of Social and Political Sciences*, 3(4), 1043-1062.
- Jovani, A. (2021). Representasi Substansi Perempuan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2014-2019 (Studi Kasus Lahirnya Peraturan Daerah Responsif Gender Tahun 2016) (Disertasi). Depok: FISIP UI.
- Jovani, A., & Roito, F. V. (2021). Social Capital as the Key to the Female Legislative Members' Success in East Nusa Tenggara's Regional House of Representatives during the 2014 General Elections. *Journal of Social and Political Sciences*, 249-255.
- Jovani, A. (2022). Perempuan dan Kebijakan Publik: Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar*, 4 (2), 1-13.
- Korschun, D., Martin, K. D., & Vadakkepatt, G. (2020). Marketing's role in understanding political activity.

Journal of Public Policy & Marketing, 39(4), 378-387.
doi:10.1177/0743915620949261.

Laporan. (2009). Transkrip Diskusi: Representasi Perempuan Sekedar Warna atau Turut Mewarnai. *Jurnal Sosial Demokrasi*, 6 (2), 12-39.

Lawang, R. M. (2005). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: UI Press.

Lee, J. M., Park, Y., & Kim, G. D. (2016). Social media and regionalism in South Korean voting behavior: The case of the 19th South Korean presidential election. *Issues & Studies*, 54(3), 1840006. doi:10.1142/S1013251118400064.

Lestari, I., & Rafni, A. (2018). The political marketing of major candidates in Padang in the simultaneous head district election in June 2018. *Journal of Civic Education*, 1(3), 225-233. doi:10.24036/jce.v1i3.222.

Liu, S.-J. S. (2020). Gender gaps in political participation in Asia. *International Political Science Review*. doi:10.1177/0192512120935517.

Lovenduski, J., & Karam, A. (2002). Perempuan di Parlemen: Membuat suatu Perbedaan. Dalam J. Ballington, & S. Kadirgamar-Rajasingham, *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah* (hal. 159-161). Stockholm: IDEA International.

Marsh, D., & Stoker, G. (2011). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Mulyadi, M. (2019). Building democracy by public participation to vote in the 2019 general election. *Info Singkat*, 11(9), 13-18. Diambil kembali dari

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-9-I-P3DI-Mei-2019-192.pdf.

- Noor, T. (2009). The general election commission's role in elevating public participation in the general election. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 51-71. Diambil kembali dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20KANJURUHAN%20Vol%202%20no%201.pdf
- Nurmalasari, D. M. (2011). Modal Sosial Calon Legislatif dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Inspirasi*, 1 (2).
- Phillips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford: Clarendon Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California.
- Puskapol. (2019, December). *Data DPRD Provinsi Terpilih 2019*. Diambil kembali dari Puskapol UI: <https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019>.
- Putnam, R. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*, 13 (Spring 1993), 35-42.
- Putnam, R. (1993). Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America. *PS: Political Science and Politics*. 28 (4), 664.
- Putri, I. A. (2018). *Modal Sosial dan Kemenangan Perempuan Caleg dalam Pemilu 2014 di DPRD Sumatera Barat (Disertasi)*. Depok: FISIP UI.
- Santoso, S. (2005). *Mastering statistics in informational era by SPSS 12*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Sedgwick, P. (2015). Multistage sampling. *BMJ*, 351, 1-2. doi:0.1136/bmj.h4155.
- Sirait, B.C & Jovani, A. (2022). The Use of Social Capital and the Victory of Female Representative Candidates in East Nusa Tenggara's Regional Representative Body during the 2019 Elections. *Journal of Social and Political Sciences*, 5(2), 44-51.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rahmatunnisa, M. (2015). Jeje-Adang's capital relations in local election in Pangandaran Regency. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 34(2), 378-388. Diambil kembali dari <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/3671/pdf>.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1990). *Basic of Qualitative Research: Graunded Theory Procedur and Technique*. Baverly Hills: Sage Publication.
- Subono, N. I. (2009). Menuju Representasi Politik Perempuan yang Lebih Bermakna. *Jurnal Sosial Demokrasi*, 6 (2), 56-61.
- Subono, N. I. (2013). Partisipasi Politik Perempuan, Politik Elektoral dan Kuota: Kuantitas, Kualitas dan Kesetaraan? *Jurnal Perempuan*, 18 (4).
- Sugiyono, S. (2017). *Quantitative, Qualitative, and Mixed Research Methods*. Bandung: Alfabeta.
- The General Election Supervisory Agency of Manado city. (2019, August 6). Dipetik December 20, 2021, dari <http://manado.bawaslu.go.id/2019/04/berikut-partai-politik-peserta-pemilu/>.
- Thompson, M. R. (2002). Female Leadership of Democratic Transitions in Asia. *Pasific Affairs*, 75 (4), 535-555.

- Wagner, M., Johann, D., & Kritzinger, S. (2012). Voting at 16: Turnout and the quality of vote choice. *Electoral Studies*, 31, 372-383. doi:10.1016/j.electstud.2012.01.007.
- Willocq, S. (2019). Explaining time of vote decision: The socio-structural, attitudinal, and contextual determinants of late-deciding. *Political Studies Review*, 17(1), 53-64. doi:10.1177/1478929917748484.
- Zamroni, M. (2013). Women in the political communication and gender review. *Jurnal Dakwah*, XIV(1), 103-132. doi:10.14421/jd.2013.14105.

INDEKS

D

Demokrasi, vi, 27, 28, 109, 111, 113

DPRD, iii, vi, 1, 2, 4, 14, 16, 20, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 57, 63, 69, 76, 83, 85, 89, 91, 92, 104, 110, 112

E

Elit, ii, iii, 71, 76, 81, 87, 90, 97

G

Gender, 109, 110, 111

K

Keluarga, 52, 63, 70

M

Modal Moral, ii, 60

Modal Sosial, ii, iii, 60, 63, 112

Moral Capital, iii, 22, 63, 109

N

NTT, i, iii, vi, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 110

P

Partai Golkar, vi, 1, 15, 20, 27, 28, 32, 33, 35, 43, 55, 57, 58, 72, 75, 76, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99

Partai Nasdem, vi, 1, 20, 27, 32, 33, 35, 42, 43, 44, 46, 72, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 98

Partai Politik, ii, iii, 32, 71, 97

PDI Perjuangan, 76, 77, 78, 79

Pemilu, i, iii, 32, 39, 63, 69, 80, 91, 97, 108, 110, 112

Perempuan Caleg, i, ii, iii, v, 32, 60, 63, 69, 71, 97, 112

PKB, vi, 1, 20, 27, 33, 35, 49, 50, 54, 72, 75, 76, 87, 88, 89, 90, 98

R

Representasi Politik, 113, 116

TENTANG PENULIS

Audra Jovani adalah dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta. Perempuan kelahiran Cimahi, Bandung Jawa Barat, pada 23 Agustus 1982 ini, menempuh pendidikan S-1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia dari tahun 2001 sampai 2005. Kemudian mendapatkan beasiswa di Departemen Ilmu Politik *Peoples' Friendship University of Russia* dari tahun 2006 sampai 2009. Gelar dokornya diraih pada 20 Januari 2021 dalam bidang Ilmu Politik di Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia melalui Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (BUDI LPDP Kemenkeu RI) dengan disertasi berjudul "Representasi Substantif Perempuan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2014-2019 (Studi Kasus Lahirnya Perda Responsif Gender Tahun 2016)". Selain menjadi dosen, penulis juga aktif sebagai ketua Pusat Studi Gender (PSG) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia (LPPM UKI).

Penulis aktif di Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Kristen Indonesia (Satgas PPKS UKI); Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA UKI); Koordinator Matakuliah Pancasila Matakuliah Kebangsaan Universitas Kristen Indonesia (MKK UKI); Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Konvensi Hak Anak (KHA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia; Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Waligereja Indonesia (SGPP KWI).

Penulis juga melakukan penelitian dengan tema perempuan dan politik yang telah dipublikasikan di jurnal

internasional, jurnal nasional, book chapter diantaranya: ASEAN Episentrum Pertumbuhan Dunia: Gagasan Konstruktif Masyarakat Indonesia (2023); *Utilization of Social and Moral Capital by Female Legislative Candidates for East Java's Regional Legislative Assembly in the 2019 General Elections* (2023); *The Use of Social Capital and the Victory of Female Representative Candidates in East Nusa Tenggara's Regional Representative Body during the 2019 Elections* (2022); *Book Chapter Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal* (2022); Sosialisasi Tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan dalam Rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (2021); Perempuan dan Kebijakan Publik: Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2021); *Social Capital as the Key to the Female Legislative Members' Success in East Nusa Tenggara's Regional House of Representatives during the 2014 General Elections* (2021); *Women in the Parliament and Their Role in Formulating Gender Responsive Policies in East Nusa Tenggara* (2022); *Nokas: Mahalnya Cinta dalam Balutan Budaya Belis di Tanah Timor, Nusa Tenggara Timur* (2020); Tinjauan terhadap Gaya Kepemimpinan Perempuan di Pemda Kabupaten Toraja Utara (2019); Upaya Pencegahan Praktik Perdagangan Perempuan di Nusa Tenggara Timur (2019); Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Umum 2014 (2018); dan Politik dan Kaum Feminis (2017).

PEREMPUAN DI PARLEMEN LOKAL : Pengalaman dari Nusa Tenggara Timur

Pada pemilu 2019 hanya terdapat enam provinsi dengan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen (DPRD provinsi) lebih dari 100 persen. Provinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua Barat. Keberhasilan dan kemenangan perempuan calon legislatif (caleg) di parlemen lokal ini merupakan kabar gembira, terutama di Nusa Tenggara Timur (ditengah kuatnya budaya patriarki).

Pengalaman perempuan caleg di Nusa Tenggara Timur dalam memanfaatkan modal sosial dan moral capital ini dapat menjadi contoh bagi perempuan, khususnya perempuan caleg untuk mencapai kemenangannya menjadi wakil rakyat.



Audra Jovani adalah dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia. Doktor dalam bidang Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini aktif melakukan penelitian dengan fokus gender, perempuan dan politik, politik lokal, dan demokrasi.



ukipressdigital.uki.ac.id



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-8287-37-6

